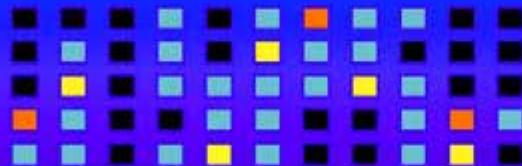


LAPORAN TAHUNAN KPK 2021

# MISI SELAMATKAN NEGERI



Laporan Tahunan KPK 2021

Diterbitkan oleh:  
Komisi Pemberantasan Korupsi

Penulis :  
Tim Penulis Laporan Tahunan KPK 2021  
105 Pages

Komisi Pemberantasan Korupsi  
Jalan Kuningan Persada Kavling 4 Jakarta 12920

Call Center 198  
[www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)

# VISI



**Bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju.**

- 1 Meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengelolaan administrasi lembaga Negara dan pemerintah yang antikorupsi.
- 2 Meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan antikorupsi yang komprehensif.
- 3 Pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan hukum
- 4 Meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas dan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang

# MISI

# TUGAS & FUNGSI



1

Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

2

Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.

3

Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

4

Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

5

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

6

Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



# Strategi Pemberantasan Korupsi

- Pendidikan antikorupsi untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran dan Integritas, sehingga kelak orang tidak memiliki keinginan untuk melakukan korupsi.
- Strategi pencegahan sebagai upaya perbaikan sistem dan tata kelola untuk menutup celah rawan korupsi.
- Strategi penindakan untuk memberikan efek jera sekaligus mengoptimalkan pemulihan kerugian negara.

## Nilai dasar **IS KPK**

### Integritas

Integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku di Komisi. Unsur-unsur Integritas meliputi ketaatan pada peraturan perundang-undangan, konsistensi pada nilai-nilai kebenaran, antikorupsi, kejujuran, budi luhur, kebaikan, kepercayaan, dan reputasi yang baik.

### Sinergi

Sinergi adalah kesesuaian pemikiran dan cara pandang terhadap masalah pemberantasan korupsi dari pelaku-pelaku atau elemen-elemen organisasi yang berbeda. Dengan demikian, Sinergi dimaknai sebagai relasi kolaboratif yang bermanfaat dari para pelaku atau elemen untuk mencapai tujuan bersama baik di dalam, maupun di luar organisasi tanpa mengurangi independensi para pelaku.

### Keadilan

Adil bermakna menempatkan hak dan kewajiban seseorang secara berimbang yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama terhadap setiap manusia.

### Profesionalisme

Profesionalisme merupakan kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara baik yang membutuhkan adanya pengetahuan, keahlian, dan perilaku seseorang dalam bidang tertentu yang ditekuninya berdasarkan keilmuan dan pengalamannya.

### Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menggerakkan dan memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan serta keberanian untuk mengambil keputusan tepat pada waktunya yang dapat dipertanggungjawabkan.

# DAFTAR ISI



## ● Pendidikan

- 54 Implementasi Pendidikan Antikorupsi
- 56 Bergerak Cetak Generasi Antikorupsi
- 58 Mudah Menemukan Sumber Pembelajaran
- 60 Jangkau Jabatan Strategis, Agar Korupsi Terkikis
- 62 Tak Jemu Mencetak Aktor Perubahan
- 64 Masyarakat Terlibat, Karakter Integritas Menguat
- 66 Menebar Semangat Antikorupsi
- 68 Berjuang Menguatkan Integritas Penyelenggara Negara
- 70 Lebih dari Sekadar Berkreasi

- 74 Terus Mengulik Partisipasi Publik
- 76 Desa Antikorupsi
- 78 Selamatkan Negeri Melalui Diksi
- 80 Mudahnya Mengakses Literasi Antikorupsi

## ● Pencegahan

- 84 Monitor Sendi Negeri Lewat Tiap Sektor
- 86 Dampingi Penanganan Pandemi
- 88 Tak Lepas Monitor Bansos
- 90 Mengkaji Sektor Keuangan Negara
- 92 Memastikan Keadilan di Lembaga Peradilan
- 94 Survei Penilaian Integritas yang Konstruktif

# DAFTAR ISI



---

**98** Mendorong Transparansi Lewat Laporan Harta Kekayaan

---

**100** Peluru Baru Dunia Usaha

---

**102** Laporan Gratifikasi Agar Tak Balas Budi

---

**104** Agar Tak Terjebak Gratifikasi

---

**108** Inovasi Cegah Korupsi

---

**110** Bersama Selamatkan Aset Negara

---

**112** Jadi Jembatan Atasi Permasalahan

---

**114** Mengawal Daerah Agar Antikorupsi

---

**116** Sinergi Selamatkan Negeri

---

## ● Penindakan

---

**122** Data Penanganan Perkara

---

**124** Bermodalkan Tangkap Tangan

---

**126** Supervisi Perkara

---

**128** Berawal Dari Pengaduan

---

**130** Serius Merawat Barang Bukti

---

**132** Corruption Perception Index

---

**134** Bersiap Pimpin Kerja Sama Internasional Antikorupsi G20

---



## NILAI ANTIKORUPSI



JUJUR



PEDULI



MANDIRI



DISIPLIN



TANGGUNG  
JAWAB



KERJA  
KERAS



SEDERHANA



BERANI



ADIL

# Laporan Tahunan KPK Dari Masa Ke Masa



## Misi Selamatkan Negeri

Melalui Trisula Pemberantasan Korupsi KPK menjalankan misi penyelamatan negeri dengan mendorong implementasi pendidikan antikorupsi, perbaikan sistem dan penindakan untuk memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.

Kami juga terus berupaya melakukan pemulihan keuangan negara melalui serangkaian proses. Mulai dari menemukan aset-aset koruptor yang berhubungan dengan perkara, pengelolaan aset yang telah disita dan dirampas negara, sampai upaya eksekusi aset melalui lelang, hibah dan penetapan status penggunaan sehingga bisa kembali dimanfaatkan untuk kepentingan negara.

Pendidikan antikorupsi terus digenjot demi misi penyelamatan di masa depan dengan melahirkan generasi-generasi antikorupsi dan menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat dan antikorupsi. Kami juga tak lepas membantu setiap Kementerian/Lembaga dan Daerah melakukan perbaikan sistem demi terciptanya sistem pemerintahan dan kenegaraan yang sekali lagi antikorupsi!





# Mengenang Artidjo

(Dewan Pengawas KPK 2019-2021)

Sosok Artidjo Alkoster merupakan Hakim Agung ternama dan disegani dalam kiprahnya mengetuk palu putusan. Usai purnatugas, ia bahkan masih lantang membicarakan keadilan.

Palu di tangan Artidjo membawa perubahan besar bagi peradilan hukum Indonesia. Dalam tayangan Catatan Najwa pada 2018, Artidjo mengatakan keadilan itu adalah perasaan batin daripada kebenaran. Oleh sebab itu, lanjutnya, setiap putusan yang ia berikan selalu didasarkan keyakinan dari hati nurani.

Sebagai Hakim Agung di Mahkamah Agung, Artidjo memiliki sifat-sifat yang mulia dalam menjalankan profesinya, ia tak pernah mau disuap meskipun tawaran suap datang berkali-kali. Buku Sogok Aku Kau Ku Tangkap: Novel Biografi Artidjo Alkoster mengabadikannya secara lengkap. Dalam buku tersebut dikatakan pula ada bisik penuh harap di kalangan para koruptor "Asal bukan Artidjo hakimnya!"

Artidjo kerap mengecewakan harapan para koruptor. Pria kelahiran Situbondo, Jatim, pada 22 Mei 1948 itu mengganjar koruptor dengan hukuman penjara dua kali lipat dibanding pengadilan tingkat pertama.

Sebut saja eks Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum terkait korupsi wisma atlet dari 7 tahun menjadi 14 tahun. Selain itu, hukuman eks politikus Demokrat Angelina Sondakh dari 4 tahun menjadi 12 tahun.

Sejumlah nama koruptor kelas kakap pernah ditangani oleh Artidjo saat Peninjauan Kembali seperti eks Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar (seumur hidup), eks Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq (18 tahun penjara), eks Politikus Demokrat Sutan Bhatoegana (12 tahun penjara), hingga pengacara OC Kaligis (10 tahun penjara).

Berpulangannya Artidjo pada 28 Februari 2020 meninggalkan duka mendalam bagi bangsa Indonesia. Rakyat kehilangan sosok hakim berani dan tak kenal lelah dalam menegakkan keadilan di negeri ini. Artidjo ialah terang bagi peradilan Indonesia.

Selamat jalan Pak Artidjo, semoga harapan dan cita-cita bapak dapat dilanjutkan dan diwujudkan demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.



# Kata Pimpinan



# Kata Pimpinan



Penindakan KPK tidak hanya berfokus untuk memberi efek jera para pelaku korupsi, namun juga mengedepankan asset recovery sebagai sumbangsih dan kontribusi KPK kepada negara melalui PNBP.

**Firli Bahuri**

Ketua KPK



**Nurul Ghufron**

Ada tiga elemen integritas, yaitu yang pertama, tata nilai. Bagaimana memahami dan membiasakan. Kedua, tata kelola yaitu internalisasi dalam pengelolaan. Dan ketiga, tata sejahtera (kesejahteraan).



**Alexander Marwata**

Tujuannya untuk memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara dan merampas aset-aset dari hasil tipikor.



**Nawawi Pomolango**

Upaya penertiban dan penyelamatan aset untuk menghindari kerugian keuangan negara atau daerah membutuhkan sinergitas dan kolaborasi antar pemangku kepentingan terkait. Kesamaan komitmen dalam pemberantasan korupsi menjadi modal utama untuk memperkuat sinergitas tersebut.



**Lili Pintauli Siregar**

Fokus kami adalah untuk menertibkan dan menyelamatkan aset pemerintah dan optimalisasi pemanfaatan aset pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

# Kata Dewan Pengawas



# Kata Dewan Pengawas



Integritas merupakan nilai dasar etika dan pedoman perilaku di kalangan birokrat merupakan wujud dari budaya anti korupsi

## Tumpak Hatorangan Panggabean

Ketua Dewan Pengawas



**Albertina Ho**

Penegakan etik merupakan salah satu Pilar yg penting bagi KPK dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan KPK yg berintegritas



**Syamsuddin Haris**

Penegakan kode etik adalah salah satu cara Dewan Pengawas mengawal KPK agar lebih profesional, akuntabel, dan berintegritas



**Harjono**

Pemberantasan korupsi yang beretika akan teguhkan demokrasi

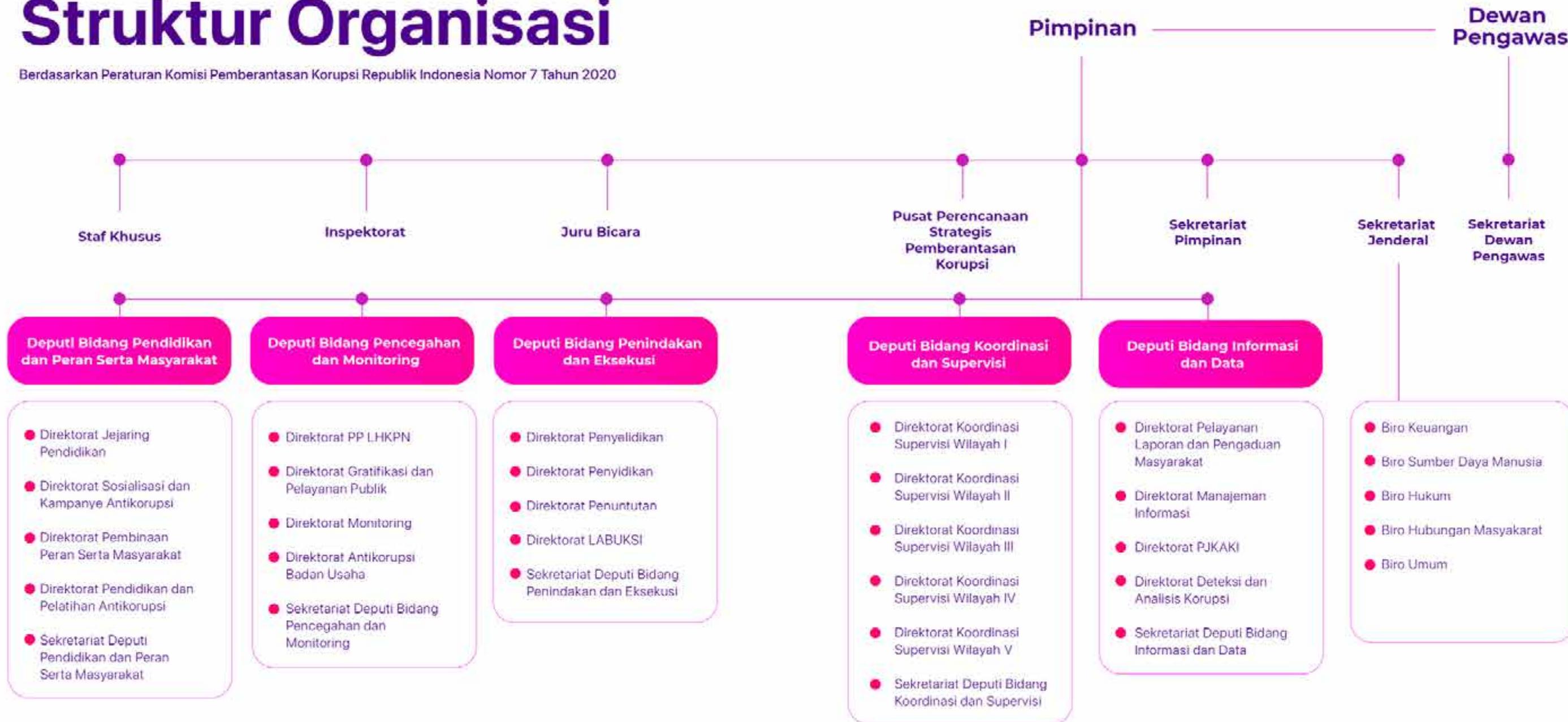


**Indriyanto Seno Adji**

Penegakan etik merupakan cermin profesionalitas pemberantasan korupsi

# Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020



## Anggaran KPK

# Dari Rakyat, untuk Rakyat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selalu bekerja demi kepentingan rakyat. Mengingat seluruh biaya operasional hingga gaji pegawai berasal dari rakyat, maka kami bekerja keras untuk mengembalikan dan menyelamatkan uang rakyat dari tangan-tangan yang tak berhak.



**Anggaran**



**Penyelamatan**

# Anggaran KPK



Sekretariat Jenderal	Rp781,4 Miliar	(96,7%)
Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat	Rp32,4 Miliar	(87,5%)
Kedeputian Pencegahan dan Monitoring	Rp35,3 Miliar	(90,2%)
Kedeputian Penindakan dan Eksekusi	Rp48 Miliar	(95,1%)
Kedeputian Koordinasi dan Supervisi	Rp16,5 Miliar	(93,3%)
Kedeputian Informasi dan Data	Rp87,6 Miliar	(94,1%)
Inspektorat	Rp906 Juta	(82,1%)
Sekretariat Dewan Pengawas	Rp1,1 Miliar	(84,6%)

# Penyelamatan KPK



<b>Rp118,09 Triliun</b> Penyelamatan Potensi Kerugian Negara dari pemulihan / penertiban aset, realisasi PSU, Piutang PAD yang berpotensi tidak tertagih, dan sertifikasi asset	<b>Rp2,4 Miliar</b> Pendapatan Gratifikasi yg ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara	<b>Rp238,9 Miliar</b> Penindakan
<b>Rp177,9 Miliar</b> Hibah & Penetapan Status Penggunaan (PSP)	<b>Rp1,52 Triliun</b> Penyelamatan potensi kerugian keuangan negara dari kajian perbaikan tata kelola	<b>Rp10,7 Miliar</b> Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

# Kembali untuk Negara

Terus meningkat. Upaya mengembalikan kerugian keuangan negara akibat kasus korupsi menunjukkan tren peningkatan pada tiga tahun terakhir. Melalui hibah dan penetapan status penggunaan (PSP), KPK berupaya agar barang rampasan dan sitaan dari kasus korupsi dapat kembali bermanfaat untuk negara.



Data Hibah dan Penetapan Status Penggunaan (PSP) 3 Tahun terakhir

## Data Hibah dan Penetapan Status Penggunaan (PSP) tahun 2021

Total Hibah/PSP:  
**Rp177.974.707.000.00**

### Tanah

Penerima :

1. Mabes TNI AL	Rp55.823.297.000
2. Kementerian Agama	Rp19.303.376.000
3. Kementerian ATR-BPN	Rp4.992.537.000
4. Pemerintah Kota Yogyakarta	Rp55.323.251.000
5. Komisi Pemilihan Umum	Rp8.101.723.000
6. Kepolisian RI	Rp11.593.590.000

### Bangunan

Penerima :

1. Kejaksaan RI (Tanah & Bangunan)	Rp14.349.705.000
2. Komisi Pemberantasan Korupsi	Rp7.189.520.000

### Kendaraan

Penerima :

1. Kementerian Keuangan	Rp1.297.708.000
-------------------------	-----------------

### Data hasil Lelang sepanjang 2021

Total : **Rp6.402.255.594**

Barang Mewah	Rp41.675.018
Barang Elektronik	Rp70.347.980
Kendaraan	Rp3.157.078.289
Perhiasan/Batu Mulia/Logam Mulia	Rp700.428.294
Property	Rp2.432.726.013

## Komposisi SDM

# Setelah Beralih Status

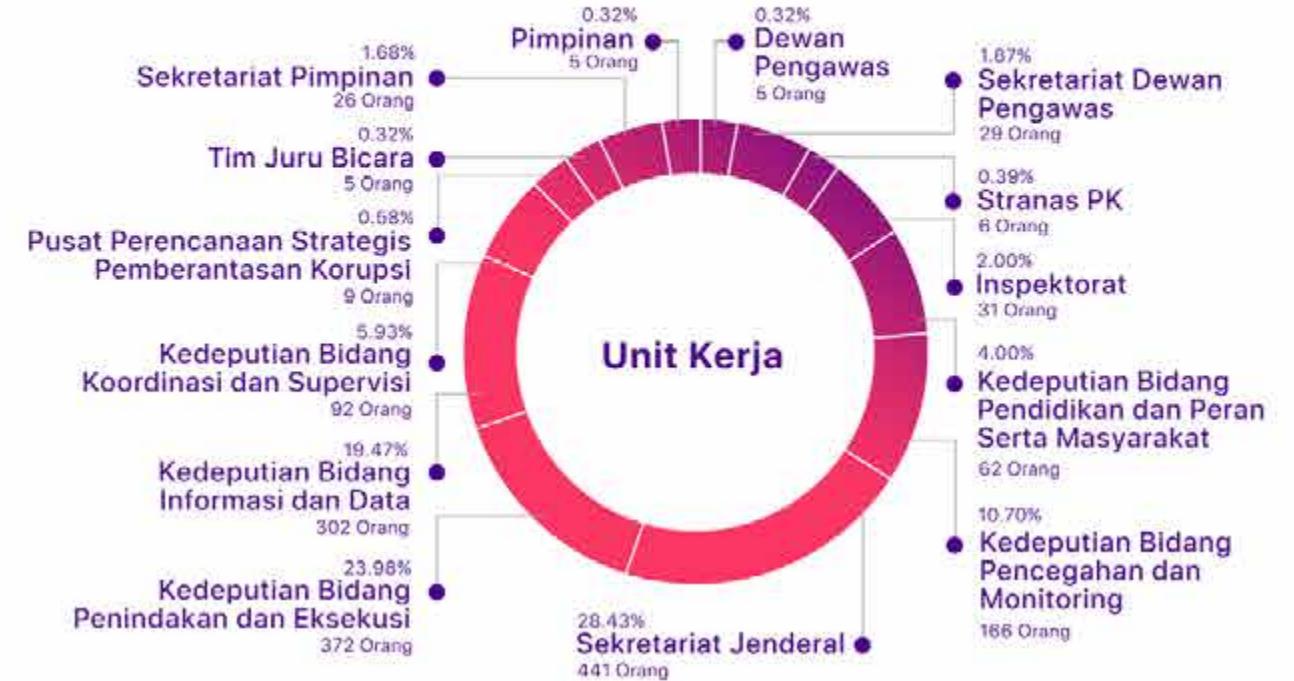
Amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah Aparatur Sipil Negara.

Atas dasar itu, KPK melantik pegawai pada 1 Juni dan 15 September 2021 sebagai tindak lanjut dari proses pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Status baru ini diharapkan akan menjadi semangat baru untuk terus bekerja dan mengabdikan kepada bangsa dan negara

### Berdasarkan Status Kepegawaian

Dewan Pengawas	5 Orang
Pimpinan	5 Orang
PNS KPK (Alih status)	1.288 Orang
PNS KPK (PNYD mutasi menjadi PNS KPK)	33 Orang
PNYD	224 Orang

**Total Pegawai : 1.551 Orang**



### Jenis Kelamin



Laki-laki : 1.042  
Perempuan : 509

### Rentang Usia

Rentang Usia	Jumlah
Usia < 25	6
Usia 25 – 30	338
Usia 31 – 35	363
Usia 36 – 40	421
Usia 41 – 45	240
Usia 46 – 50	106
Usia 51 – 55	56
Usia 56 – 60	16
Usia > 60	5

# Alih Status Pegawai KPK

Penetapan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara

**27 Januari 2021**

Persiapan kegiatan Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara.

**27 Februari 2021**

Tes Wawancara  
**19 Maret - 9 April 2021**

**9 Maret - 8 April 2021**

Tes Indeks Moderasi Bernegara (IMB-68) dan Integritas Batch 1

Pelantikan 1.271 orang Pegawai KPK

**1 Juni 2021**

Pembukaan Orientasi ASN di lingkungan KPK diikuti oleh seluruh pegawai yang mengikuti alih status

**16 Juni 2021**

**21 Juni - 11 Oktober 2021**

Orientasi bagi 1.289 pegawai di lingkungan KPK dilaksanakan secara blended learning

**27 April 2021**

Penyerahan hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan dari BKN kepada KPK

Pelantikan 18 orang Pegawai KPK

**15 September 2021**

Penutupan Orientasi ASN di lingkungan KPK diikuti oleh seluruh pegawai yang telah mengikuti Orientasi ASN.

**25 Oktober 2021**

**22 September 2021**  
Tes Wawancara

**22 Juli - 24 Agustus 2021**

Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK di Universitas Pertahanan RI (Unhan) untuk 18 pegawai yang masuk dalam kategori tidak memenuhi syarat yang bersedia ikut diklat.

**20 September 2021**

Tes Indeks Moderasi Bernegara (IMB-68) dan Integritas Batch 2

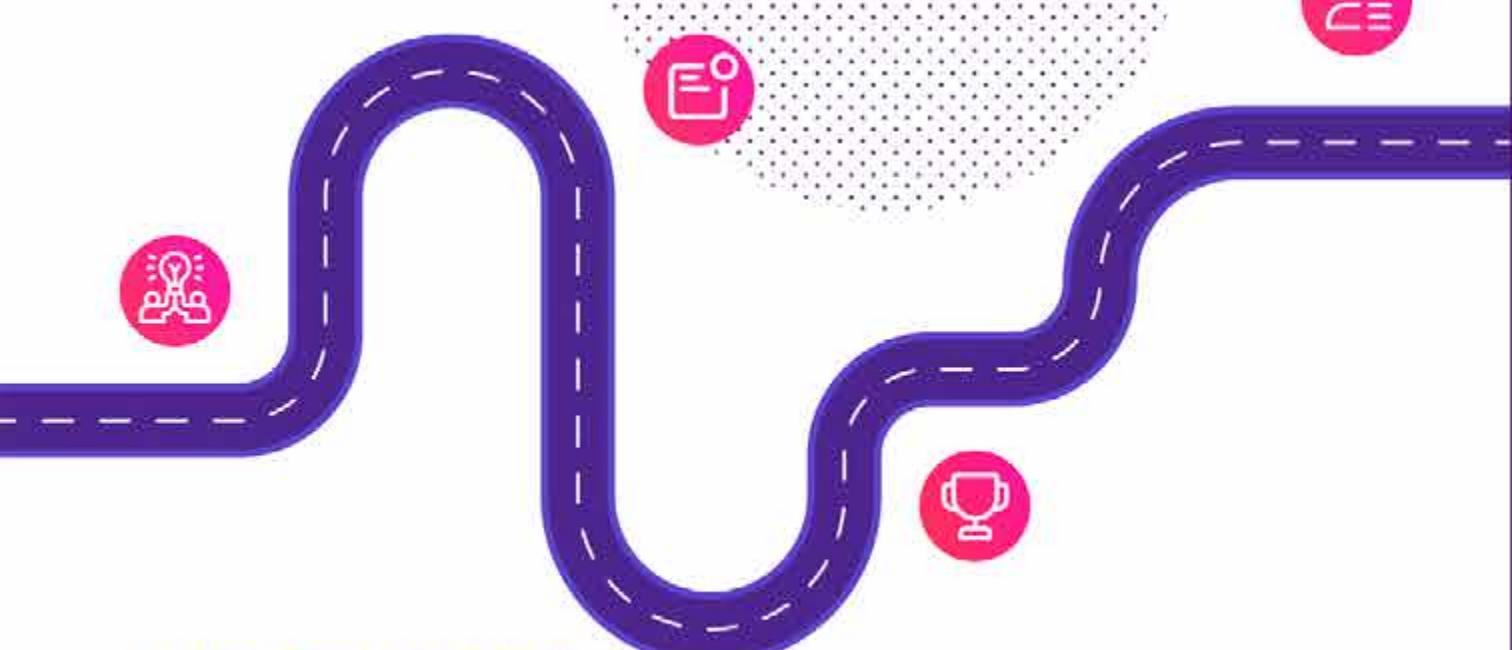
# Kelola Pengetahuan Ciptakan Perubahan

Pengetahuan adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan melahirkan inovasi bagi kemajuan organisasi. KPK telah merintis implementasi manajemen pengetahuan sejak 2019 dan terus dikembangkan. Ini semua dilakukan agar KPK kian tangguh menghadapi tantangan di masa depan.

## Strategi implementasi 2021

1. Menyelenggarakan sesi berbagi pengetahuan (KOMEN-Day): 10 kegiatan
2. Mendorong unit kerja berbagi pengetahuan: 155 kegiatan
3. Menyusun dan memperbarui peta pengetahuan: 27 K-MAP
4. 28 unit kerja terlibat aktif
5. Mengumpulkan aset pengetahuan: 74+ aset
6. Peningkatan kompetensi: 1 kegiatan
7. Menerbitkan regulasi
8. Membangun aplikasi SMART KPK





Kaleidoskop 2021

# Kilas Balik Selamatkan Negeri

Runtutan perjalanan pemberantasan korupsi tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Layaknya Trisula KPK – Pendidikan, Pencegahan, dan Penindakan akan selalu beriringan dalam usaha menyelamatkan negeri dari korupsi. Di tengah situasi pandemi yang masih merongrong, KPK tetap mengejar koruptor yang menggarong. Agar supaya uang rakyat bisa terselamatkan.

Uang dan aset yang terselamatkan, tidak sekadar didiamkan, namun dikembalikan kepada negara agar termanfaatkan.

Lagi, penguatan kerja sama antar-lembaga terus ditingkatkan. Tujuannya untuk memperkokoh hubungan dengan lembaga dan instansi lain, dalam agenda menjaga negeri lewat pencegahan dan pemberantasan korupsi.

01

Jan

**8 Januari**

KPK, Kemenkes dan Kementerian BUMN sepakat mengawal jalannya vaksin Covid 19

**28 Januari**

KPK bersama Komisi Aparatur Sipil Negara melakukan penandatanganan MoU terkait pemberantasan korupsi

02

Feb

**10 Februari**

Reka Adegan Pemberian Sepeda Brompton dalam Kasus Bansos

**23 Februari**

KPK serahkan aset berupa tanah dan bangunan senilai Rp55,8 Miliar kepada TNI AL terkait kasus Fuad Amin

**25 Februari**

KPK melakukan evaluasi perizinan usaha perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua Barat terkait Gerakan Penyelamatan Sumber daya Alam atau GNPSDA

03

Mar

**1 Maret**

Anggota Dewan Pengawas KPK Artidjo Alkostar meninggal dunia

**2 Maret**

KPK bersama 27 BUMN menandatangani Kerja Sama Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi atau Whistle Blower System terintegrasi

**15 Maret**

KPK sita Rp53 Miliar terkait penanganan dugaan kasus suap ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan

**26 Maret**

KPK tahan RJ Lino

04

Apr

**1 April**

KPK tetapkan Bupati Bandung sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Barat Tahun 2020

**7 April**

KPK serahkan aset senilai Rp29,5 Miliar kepada Kementerian ATR/BPN, Kementerian Agama, dan Polri dalam kasus terpidana Fuad Amin

05

Mei

**3 Mei**

KPK luncurkan Aplikasi JAGA Laporan Covid

**28 Mei**

KPK menahan mantan Direktur Jasindo periode 2008-2016 "SLH"

06

Jun

**4 Juni**

KPK gelar Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) kepada Kementerian ESDM

**17 Juni**

KPK menetapkan empat orang anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 yakni FR, AEP, WI dan ZA, dalam kasus suap terkait pengesahan APBD Provinsi Jambi tahun 2017 dan 2018

**24 Juni**

Dewan Pengawas KPK meluncurkan Aplikasi Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Tugas, Wewenang, dan Kode Etik di Lingkungan KPK atau E- LADUMAS OTENTIK

07

Jul

**15 Juli**

Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo 5 tahun penjara dan denda 400 juta atau subsidair 6 bulan kurungan penjara terkait korupsi ekspor benih lobster

**22 Juli**

KPK Kembali menggelar Akademi Jurnalis Lawan Korupsi atau AJLK 2021

08

Agu

**23 Agustus**

Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara serta diwajibkan membayar uang pengganti senilai 14,5 Miliar atau subsidair 2 tahun kurungan penjara terkait kasus bantuan sosial Covid-19

**31 Agustus**

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 22 orang tersangka sekaligus melakukan penahanan terkait dugaan tindak pidana korupsi seleksi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021

09

Sep

**7 September**

KPK bersama Kejaksaan RI, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung di wilayah Jawa Barat berhasil selamatkan 203 aset tanah daerah senilai total Rp54 Miliar

**21 September**

KPK dan TNI perkuat sinergitas pencegahan korupsi

**22 September**

KPK menggelar kompetisi Jaga Data Challenge

**24 September**

KPK menetapkan AZ Wakil Ketua DPR RI Periode 2019-2024 sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK di Kabupaten Lampung

10

Okt

**14 Oktober**

KPK gelar Penguatan Antikorupsi Penyelenggara negara berintegritas (Paku Integritas) kepada Kementerian Pertanian Perdagangan, KPU dan Bawaslu

**16 Oktober**

KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Musi Banyuasin "DRA", terkait dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji pada pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2021

11

Nov

**9 November**

KPK menghibahkan aset hasil rampasan terpidana korupsi senilai Rp255 Miliar kepada 5 instansi antara lain Kejaksaan RI, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, KPU, dan Pemkot Yogyakarta

**16 November**

KPK gelar Penguatan Antikorupsi Penyelenggara negara berintegritas (Paku Integritas) kepada Kementerian Sosial

**24 November**

Sinergi KPK, BNN, dan BNPT dalam pemberantasan kejahatan luar biasa

**25 November**

KPK bersama Kadin menandatangani MoU dalam mendorong pelaku usaha bebas korupsi

12

Des

**1 Desember**

Dalam rangkaian kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia atau Hakordia tahun 2021, KPK meluncurkan program Desa Antikorupsi di Kampung Mataraman Panggungharjo, Yogyakarta

**4 Desember**

KPK menggelar Malam Anugerah Anti-Corruption Film Festival (ACFFest) 2021

**6 Desember**

KPK gelar pemberian penghargaan terkait Pelaporan dan Pengendalian Gratifikasi, serta Penghargaan bagi Wajib Laport LHKPN Inspiratif

**7 Desember**

KPK menggelar Wisuda Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi (AJLK) 2021

**9 Desember**

KPK gelar puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021 dengan tema "Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi"

# Menakar Persepsi Publik



## 82,5%

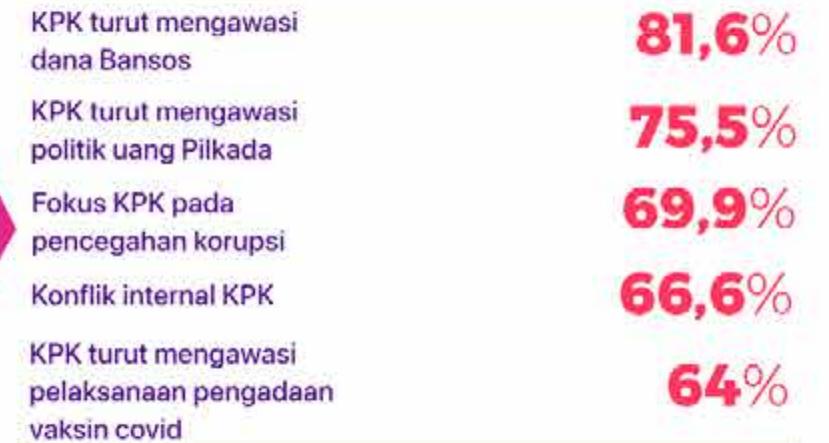
Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Kebenaran Informasi tentang KPK di Media



Menginjak delapan belas tahun berkiprah, KPK terus berbenah. KPK sadar tugas sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia akan sulit terlaksana jika tidak memperoleh dukungan dan kepercayaan penuh dari publik. KPK pun melaksanakan Survei Persepsi Publik terhadap Pemberitaan dan Publikasi KPK tahun 2021 sebagai evaluasi terhadap tingkat dukungan dan kepercayaan ke lembaga antirasuah.

Survei persepsi publik ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas berbagai program yang dilakukan KPK serta pilihan media yang selama ini telah digunakan.

Isu utama yang paling banyak diketahui publik



## 98,7%

Tingkat Awareness Masyarakat terhadap Berita KPK



Tingkat Pengetahuan mengenai Media KPK



Media Sumber Informasi KPK





# Penghargaan KPK 2021

Di tengah usaha merawat kinerja dan integritas lembaga, terdapat sejumlah penghargaan selama bekerja. Ini semata-mata jadi penambah semangat untuk berkarya. Tujuan akhirnya tetap sama, untuk menjaga negeri pertiwi agar bebas dari korupsi.



Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2020.



Meraih Predikat A dengan nilai 82,14 pada Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020.



Honorable Mention atas Aplikasi JAGA dalam acara World Justice Challenge 2021: Advancing the Rule of Law in a Time of Crisis.



Meraih Peringkat V terbaik dengan nilai 86,93 dan kategori A (Memuaskan) pada Penghargaan Kearsipan dari ANRI.



Anugerah Meritokrasi 2021 yang diselenggarakan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan predikat sangat baik, atas keberhasilan KPK menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN.

# Melayani Informasi Sepenuh Hati

Pandemi Covid-19 bukan halangan bagi kami untuk memberikan informasi kepada publik. Meskipun sejak Maret 2020 KPK menutup layanan informasi tatap muka, KPK tetap melayani permintaan informasi dengan sepenuh hati baik melalui email [informasi@kpk.go.id](mailto:informasi@kpk.go.id) maupun call center 198.



## Sepanjang Tahun 2021



**7.611**

E-Mail



**174**

Permohonan Penelitian



**458**

Demonstrasi

Call Center  
**198**

**7.521**

Total Telepon  
Sepanjang 2021

**961**

Informasi Publik

**6.470**

LHKPN

**248**

Tidak Teridentifikasi

**99**

Gratifikasi

**189**

Pengaduan Masyarakat

**78**

Survei SPI



# Merawat Jaringan Kerja Sama yang Kuat

Upaya penguatan dan peningkatan jaringan kerja sama terus dilakukan KPK di tingkat nasional maupun internasional. Kerja sama nasional dengan mitra strategis seperti mitra Kementerian, Lembaga, Organisasi, Pemerintah dan Swasta (KLOPS) serta kerja sama internasional baik dengan mitra bilateral maupun multilateral. Kerja sama yang baik ini berimplikasi pada terpenuhinya kebutuhan informasi dan data yang digunakan KPK untuk berbagai kepentingan termasuk dalam penanganan perkara.

Sepanjang 2021, KPK telah melaksanakan berbagai peningkatan kerja sama baik secara formal maupun non formal melalui Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

## Kerja Sama Nasional

Penandatanganan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri di tahun 2021

12

Nota Kesepahaman (MoU)

59

Perjanjian Kerja Sama (PKS)

511

Pertukaran Informasi dan Data Mitra Dalam Negeri

## Kerja Sama Internasional

Penandatanganan Naskah Kerja Sama Luar Negeri di tahun 2021

1

Penandatanganan Perpanjangan MoU

KPK dan Ministry of Justice Investigation Bureau (MJIB), Taiwan (secara desk to desk)

13

Kegiatan Pembinaan Jaringan dan Peningkatan Kapasitas Mitra Luar Negeri

43

Pertukaran Informasi dan Data Mitra Luar Negeri

### Forum Multilateral selama 2021

- ASEAN-PAC Secretariat Meeting ke- 17
- APEC Anti-Corruption and Transparency Working Group ke-33 (ACTWG)
- The 12th Meeting of the Open Ended Intergovernmental Working Group on the Prevention of Corruption
- The Resumed Twelfth Session of the Implementation Review Group (IRG)
- Rangkaian pertemuan sesi ke-9 Conference of the States Parties (CoSP) to the UNCAC
- Tiga pertemuan G20 ACWG.

### Kerja sama bilateral bersama:

- Italia
- United States of America
- Australia
- United Kingdom
- India

# PENDI DIKAN

Pendidikan untuk semua kalangan, di mana saja dan kapan saja. Itu pula yang menjadi semangat kami dalam menghadirkan pendidikan integritas dan membekali kompetensi antikorupsi bagi masyarakat.

Karena itu, pendidikan sebagai salah satu dari tiga sula dalam strategi "Trisula Pemberantasan Korupsi" tak hanya fokus pada penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyediaan sumber pembelajaran semata. Namun juga menyentuh kebijakan yang mendorong diimplementasikannya pendidikan antikorupsi pada semua jenjang pendidikan.

Tak lupa, sosialisasi dan kampanye antikorupsi juga tak henti dilakukan melalui berbagai medium yang ada. Dan yang tak

alah penting, kolaborasi dan pelibatan peran serta masyarakat adalah kunci agar internalisasi dan aktualisasi integritas dapat berjalan sesuai harapan.

Kondisi pandemi yang memasuki tahun kedua, tak menyurutkan langkah KPK untuk terus melakukan itu semua. Menjalankan misi membangun karakter bangsa adalah jalan panjang nan berliku yang harus ditempuh demi masa depan generasi kita yang lebih baik.

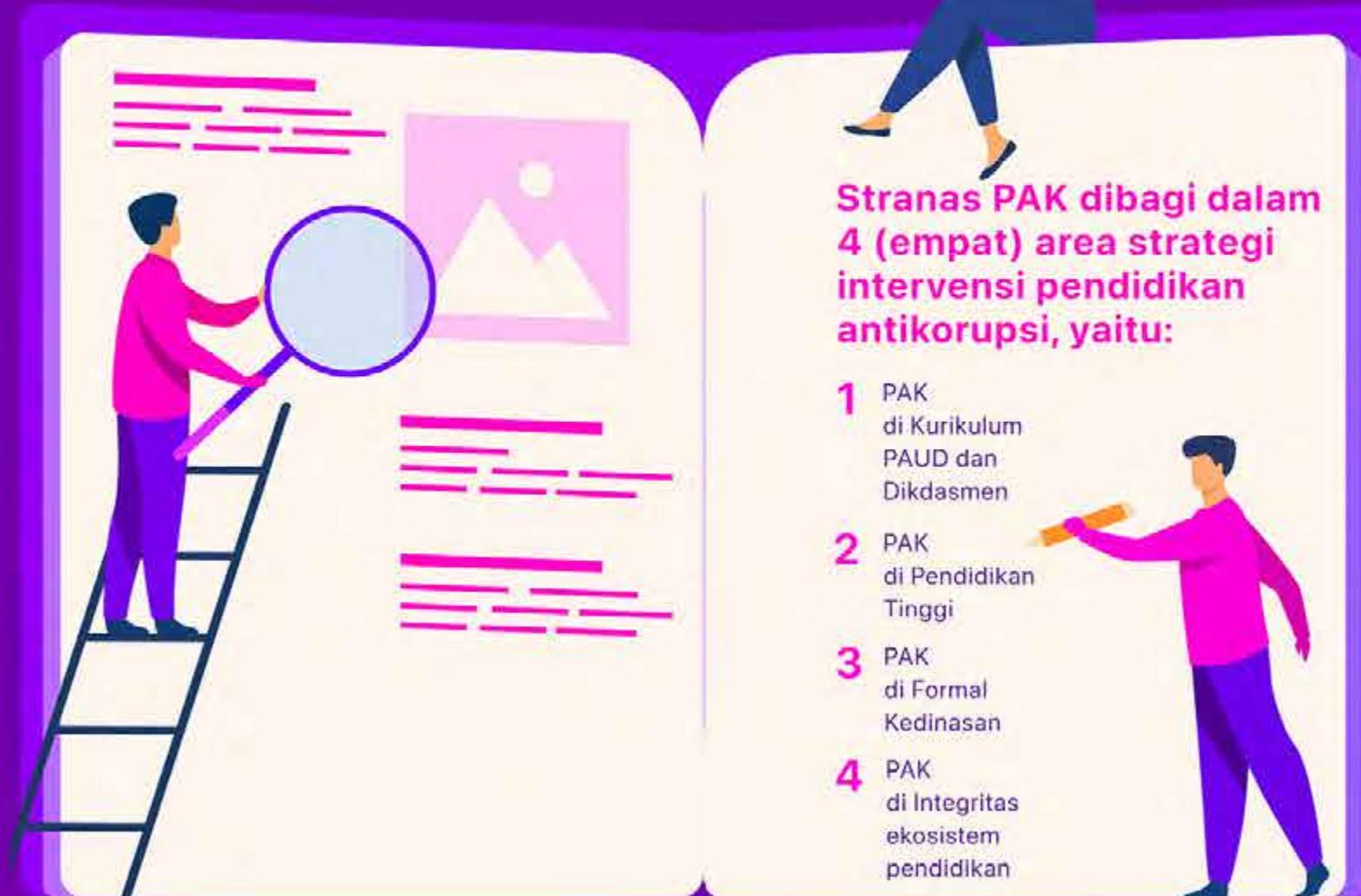


# Implementasi Pendidikan Antikorupsi

Dalam kurun dua tahun terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serius mengawal implementasi pendidikan antikorupsi dari tingkat pendidikan dasar, menengah, tinggi hingga kedinasan. Tidak hanya mengimplementasikan pendidikan antikorupsi sebagai mata pelajaran dan mata kuliah, namun juga membangun ekosistem pendidikan yang berintegritas.

Pada 2021, KPK menggelar Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Antikorupsi (Rakornas PAK) sebagai komitmen bersama para pemangku kepentingan utama yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek); Kementerian Agama (Kemenag); Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KempanRB); serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Rakornas tersebut menyepakati perumusan Strategi Nasional Pendidikan Antikorupsi (Stranas PAK) sebagai upaya memastikan perluasan cakupan dan dampak berkelanjutan dalam Pendidikan Antikorupsi di Indonesia.



## Stranas PAK dibagi dalam 4 (empat) area strategi intervensi pendidikan antikorupsi, yaitu:

- 1 PAK di Kurikulum PAUD dan Dikdasmen
- 2 PAK di Pendidikan Tinggi
- 3 PAK di Formal Kedinasan
- 4 PAK di Integritas ekosistem pendidikan

## Implementasi Pendidikan Antikorupsi telah menghasilkan:

- 66% Pemda telah memiliki regulasi pendidikan antikorupsi (360 Perkada), terdiri dari 18 Pergub, 78 Perwali dan 264 Perbup.
- Implementasi PAK pada 22.055 (9,45%) Pendidikan Dasar, 3.411 (8,67%) Pendidikan Menengah dan 9301 (31,62%) Program Studi.
- Pemberdayaan dan penguatan pendidikan antikorupsi kepada 5.822 dosen, guru, kepala sekolah, unsur pemerintah daerah dan stakeholders terkait.
- Materi antikorupsi pada pendidikan formal kedinasan untuk tingkat Latsar dan PKP, dan untuk tingkat PKA, PKN 2 dan PKN 1 sedang dalam proses penyusunan.



# Bergerak Cetak Generasi Antikorupsi

Lampung jadi salah satu provinsi yang proaktif mengimplementasikan pendidikan antikorupsi sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib. Meski dengan tenaga pendidik yang masih terbatas, Sulpakar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung terus bergerak untuk memberikan bimbingan teknis kepada para guru di Lampung.

Sulpakar lalu menggelar bimbingan teknis terhadap 60 orang guru pendidikan antikorupsi di Hotel Arinas, Bandar Lampung pada pertengahan November 2021. Sekurangnya sudah 300 guru yang mendapat bimbingan teknis. Ia mengupayakan bimbingan teknis ini terus berjalan guna meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dengan kemampuan untuk membentuk sembilan sikap anak-anak didik agar jujur, disiplin, bertanggung jawab, sederhana, kerja keras, mandiri, adil, peduli, dan berani yang selama ini dikenal dengan sembilan nilai antikorupsi.

Pemerintah Daerah (Pemda) Lampung sebelumnya telah ikut berkomitmen untuk mengimplementasikan pendidikan antikorupsi usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Antikorupsi (Rakornas PAK) 2018 silam. Pemda Lampung kemudian menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 35 tahun 2019 mengenai implementasi pendidikan antikorupsi dengan menyisipkannya di beberapa mata pelajaran.

Total sembilan orang yang menjadi pionir implementasi pendidikan antikorupsi di Provinsi Lampung. Program yang tak direncanakan sebelumnya itu, berimbas pada terbatasnya anggaran. Guru-guru yang masuk tim awal tersebut mayoritas berasal dari lintas kabupaten di Lampung. Mereka harus menggunakan anggaran masing-masing untuk ke Kota Bandar Lampung guna merumuskan modul dan kerangka pembelajaran.

Meski ada sejumlah rintangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung berhasil menyusun modul dan kerangka pembelajaran. Modul itu kemudian dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 46 tahun 2020 mengenai pendidikan antikorupsi sebagai mata pelajaran wajib bagi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Kini, dari 15 kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Lampung, 12 di antaranya sudah menjadikan pendidikan antikorupsi sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib bagi Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas.

# Mudah Menemukan Sumber Pembelajaran

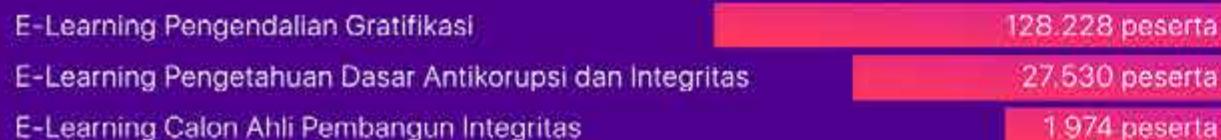


Selamat datang di era digital! Saat dimana informasi begitu melimpah. Karena itu, KPK menggunakan kesempatan ini untuk sedapat mungkin menyediakan sumber pembelajaran antikorupsi, baik melalui media online maupun media sosial. Jadi, belajar di mana saja dan kapan saja, bukan sekadar slogan belaka.

Perkembangan teknologi memungkinkan kita belajar dari mana saja dan kapan saja. Internet telah memudahkan untuk belajar tanpa harus bertatap muka. Aplikasi e-learning KPK bisa diakses melalui tautan <https://elearning.kpk.go.id> secara terbuka.



### 3 kelas dengan peserta terbanyak:



#### Facebook ACLC

**Program:**

- 2 Menit Belajar
- Teladan
- Cerita Perjuangan Antikorupsi (Cerita Perak)
- Live Event
- Webinar

#### YouTube ACLC

**Program:**

- Film Antikorupsi
- Film Animasi
- Webinar
- Tutorial
- Dokumentasi kegiatan
- Dongeng Anak

#### Instagram ACLC

**Program:**

- 2 Menit Belajar
- Teladan
- Cerita Perjuangan Antikorupsi (Cerita Perak)
- Cerita Integritas (Cergas)
- Live talkshow
- Kuis "Jumat Berkah"

#### Portal ACLC

Pengunjung: 439,527

<https://aclc.kpk.go.id>

**Program:**

- Papan permainan
- Film animasi
- Buku cerita anak
- Buku populer

#### E-Learning ACLC

**Program Pembelajaran:**

- Antikorupsi dan Integritas
- Korupsi dan Penegakan Hukum
- Sumber Daya Alam
- Tata Kelola Pemerintahan
- Politik
- Teknologi Informasi

# Jangkauan Jabatan Strategis, Agar Korupsi Terkikis

Tahun ini, KPK menyelenggarakan kegiatan pembelajaran eksternal yang difokuskan kepada kelompok masyarakat strategis seperti para penyelenggara negara (pejabat negara Eselon I), syahbandar, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Aparatur Sipil Negara (ASN), akademisi, dan Satuan Pengawasan Intern pada BUMN/BUMD.

Berbagai topik diklat disajikan guna meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam membangun karakter integritas, serta kompetensi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, antara lain terkait Corruption Risk Assesment, Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi, pencegahan korupsi dan pembangunan integritas, Probitiy Audit, Teknis Pengaduan Masyarakat, Barang Bukti Elektronik, dan sebagainya.

 **207 Hari**  
Penyelenggaraan (HP)

 **18 topik**  
pembelajaran

 **1.662 Jam**  
Pelajaran (JP)

 **78**  
Kegiatan

**Diklat:**  
**59 kegiatan**  
(2.847 peserta)

**Webinar:**  
**13 kegiatan**  
(8.589 peserta)

**Kelas Antikorupsi:**  
**6 kegiatan**  
(255 peserta)



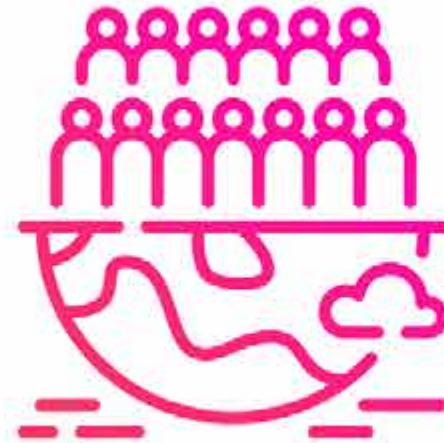
 Aparat Penegak  
Hukum/Penyidik  
PNS  
**440 orang**

 Aparatur  
Sipil Negara  
**7.319 orang**

 BUMN/D  
**3.544 orang**

 Umum  
**388 orang**

# Tak Jemu Mencetak Aktor Perubahan



Sejak tahun 2017, KPK telah melipatgandakan kekuatan dengan mencetak penyuluh antikorupsi dan ahli pembangun integritas tersertifikasi. Sebab KPK menyadari, tugas besar pemberantasan korupsi juga harus melibatkan masyarakat sebagai aktor perubahan dalam memperbaiki sistem, juga membangun karakter bangsa.



## Penyuluh Antikorupsi Tersertifikasi Berdasarkan Jenjang



Para penyuluh antikorupsi aktif melakukan beragam penyuluhan antikorupsi, mulai dari sosialisasi, kampanye, diklat, mata kuliah, insersi dalam mata pelajaran, mendongeng, berpuisi, hingga bermain *boardgame*.



3.791  
kegiatan penyuluhan



571.033  
peserta penyuluhan/  
penerima manfaat



150  
orang rata-rata diikuti  
per kegiatan penyuluhan

## Forum dan Komunitas PAKSI

Para penyuluh membentuk Forum Penyuluh Antikorupsi yang anggotanya berasal dari aneka profesi. Forum ini menjadi mitra pemerintah daerah dan kementerian/lembaga dalam menjalankan program antikorupsi.



34  
Forum Penyuluh Antikorupsi  
di setiap provinsi



5  
Forum Penyuluh Antikorupsi  
di tingkat kementerian  
(Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan,  
Kementerian Agama, BP Jamsostek, dan  
Kementerian Dalam Negeri)



1  
Forum PAKSI berbasis  
profesi (dosen)





# Masyarakat Terlibat, Karakter Integritas Menguat

Beberapa anak terlihat membentuk kelompok dengan masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang bertugas mengarahkan anggotanya. Di hadapan mereka terhampar sebuah terpal bergambar titik koordinat kartesius yang menjadi arena permainan.

Dalam permainan Benteng Besut ini, para pemimpin di tiap Kelompok akan mengarahkan anggotanya untuk bergerak melewati titik-titik koordinat sampai ke titik bendera yang sudah ditentukan oleh guru. Kelompok yang menang, yaitu mereka yang mampu mendapatkan bendera dengan cepat.

Dalam permainan ini, anak-anak tak hanya belajar matematika secara menyenangkan, melainkan juga menerapkan pendidikan karakter antikorupsi yang tercermin pada proses evaluasi pascapermainan.

Usai permainan, guru bersama para siswa mendiskusikan jalannya permainan, mulai dari strategi yang digunakan masing-masing

Ini adalah inovasi yang dilakukan Penyuluh Antikorupsi Lin Purwanti yang merupakan Guru MTs Terpadu Misykat Al-Anwar, Jombang, Jawa Timur. Lin mengembangkan metode pembelajaran matematika ke dalam

bentuk permainan, sekaligus menginsersikan nilai-nilai antikorupsi.

Pada semua muatan pelajaran Kurikulum 2013, setiap guru harus menyisipkan nilai-nilai Antikorupsi. Namun sayangnya, tidak semua mata pelajaran, memiliki panduan cara memasukkan pendidikan karakter antikorupsi itu.

"Belum adanya panduan guru dalam mengajarkan nilai-nilai antikorupsi, terlebih mata pelajaran matematika, menjadikan guru harus berpikir bagaimana merancang pembelajaran yang di dalamnya termuat nilai-nilai antikorupsi," tulis lin pada buku bunga rampai praktik baik para penyuluh antikorupsi *Menyuluh Antikorupsi Itu Keren...!* yang diterbitkan Pusat Edukasi Antikorupsi (2020).

Di sisi lain, lin mengakui, pendidikan antikorupsi yang ada saat ini masih sebatas konseptual bukan kontekstual, sehingga anak-anak hanya menguasai konsep tetapi belum mampu mengaplikasikan dengan baik. Karena itu, permainan ini hadir untuk menjawab banyak hal. Harapannya, dengan cara yang menyenangkan, anak-anak bisa menangkap materi pelajaran dan pesan moral itu.

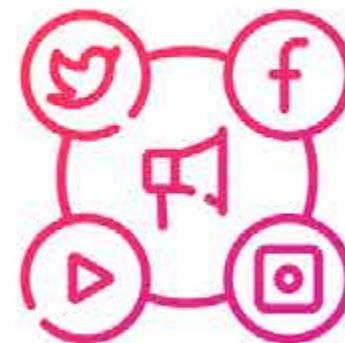
# Menebar Semangat Antikorupsi



**29 mitra** yang bekerja sama dan berkolaborasi dalam kampanye antikorupsi dengan kementerian/ lembaga, BUMN/ BUMD, sektor swasta, dan pemerintah daerah.



**85 orang** Penyelenggara Negara mengikuti PAKU Integritas



**112.000 orang** mengikuti kuis Online Pengetahuan Antikorupsi dengan rerata skor sebesar 7.1

**Cakupan publikasi** mencapai **554.601 orang** Dengan placement Iklan Digital Antikorupsi

**Optimasi Media Sosial** bekerja sama dengan Key Opinion Leader (KOL) dan Media Publisher

**Sayembara** Tagline Antivirus Korupsi



**4 karya** yang dihasilkan dalam Festival Seni Antikorupsi



**10 film pendek** hasil karya kompetisi ide cerita Festival Film Antikorupsi (Anti-Corruption Film Festival/ ACFFest).

# Berjuang Menguatkan Integritas Penyelenggara Negara



Menyadari pendidikan antikorupsi harus menyentuh semua lapisan masyarakat, KPK pun tak hanya memfokuskan pada implementasi pendidikan antikorupsi di jenjang pendidikan dasar hingga tinggi. Tahun 2021, KPK berupaya menjangkau aktor-ktor penting pada sebuah instansi.

Salah satu aktor yang dianggap dapat mendorong lahirnya perubahan dan perbaikan positif adalah penyelenggara negara setingkat eselon I pada setiap instansi pemerintah. Karena itu, KPK menyelenggarakan program Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU INTEGRITAS).

Para penyelenggara negara merupakan aktor strategis yang berada satu tingkat di bawah para menteri dan merupakan pimpinan tertinggi di instansi tersebut, sehingga memiliki posisi dan peran yang sangat strategis dalam melahirkan dan menjalankan kebijakan.

Mengapa penting? Dari data penanganan perkara KPK pada tahun 2004 – Maret 2021, ada 248 pejabat setingkat eselon I, II dan III yang terjerat korupsi. Jumlah ini merupakan terbesar ketiga pelaku korupsi, setelah Swasta (334 pelaku), dan Anggota DPR/DPRD (281 pelaku).

Karena itu, mengawal para penyelenggara negara agar tetap berintegritas serta mendorong dan menjalankan kebijakan sesuai visi pemberantasan korupsi, juga sangat penting dalam menghadirkan iklim antikorupsi di setiap instansi pemerintahan tanpa terkecuali.

PAKU INTEGRITAS terdiri dari dua kegiatan, yakni Pembekalan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara (Executive Briefing) melalui kegiatan dialog, diskusi, dan sharing. Kedua, kegiatan Diklat Pembangunan Integritas bagi Penyelenggara Negara melalui kegiatan ceramah, sharing, diskusi, dan ekskursi rumah tahanan KPK.

Pada kegiatan pertama, pembekalan antikorupsi tak hanya diberikan kepada para penyelenggara negara saja, melainkan juga bagi para pasangannya.

Mereka harus satu frekuensi dalam menjalankan peran masing-masing, baik di rumah maupun di tempat kerja, agar terbangun ekosistem yang berintegritas. Sepanjang 2021, kegiatan pembekalan ini telah dilakukan sebanyak 8 kali.

Kegiatan pembekalan lantas disempurnakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan PAKU INTEGRITAS. KPK berharap mereka mampu mengimplementasikan integritas dalam pelaksanaan tugas sekaligus memberantas korupsi di masing-masing instansi. KPK juga mendorong mereka untuk memelihara integritas dan mendorong mereka agar menjadi teladan. Sehingga ketika dihadapkan dalam posisi 'dilematis' sekalipun, mereka mampu melakukan refleksi diri agar tidak melakukan korupsi.

Sepanjang 2021, KPK menyelenggarakan PAKU INTEGRITAS empat kegiatan yang diikuti 10 kementerian dan lembaga negara, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan.

# Lebih dari Sekadar Berkreasi



Susilo, bapak beranak satu ini heran saat kuota internet yang dibelinya pekan lalu, sudah tandas. Padahal, internet menjadi kebutuhan pokok bagi sang anak, Zidan yang kini sedang belajar secara daring di rumah.

“Bapak beli kuota yang bisa dipakai siang itu lima giga. Yang sepuluh giga, biasanya dipakai malam,” ujar Tanti, sang ibu membela anaknya.

“Ya sudah, sekolahnya ganti malam saja,” ujar Susilo seenaknya.

Tiba-tiba, Zidan berujar, “Aku dapat sinyal wifi!”

Mereka bertiga girang, seolah menemukan solusi atas persoalan paceklik kuota internet yang dialami.

“Tapi nggak tahu password-nya,” ujar Zidan sedih.

Susilo dan Tanti lantas mencari berbagai cara untuk menemukan password wifi milik tetangganya itu. Hingga akhirnya mereka mendapatkannya dengan cara yang gaib, yang tanpa merasa bersalah,

mereka gunakan dan juga dijual kepada para tetangga lainnya.

Fenomena di atas begitu dekat dengan keseharian kita. Kebutuhan internet di masa pandemi, telah bergeser menjadi kebutuhan primer bagi hampir semua kalangan. Anak-anak mengikuti kegiatan pembelajaran secara online. Mengerjakan tugas hingga mengikuti ujian, semua serba online. Orangtua yang merupakan para pekerja, juga telah beradaptasi dengan mengubah pertemuan tatap muka dengan rapat-rapat melalui video conference. Dan itu semua membutuhkan internet.

Maka ketika kebutuhan mulai bergeser dan dunia berubah, namun karakter integritas tidak tertanam kuat, maka timbullah apa yang direkam dalam cerita dari film yang berjudul “Current Network” di atas.

Sang sineas berusaha untuk mengingatkan kepada kita bahwa pencurian internet milik orang lain, bukanlah hal sepele yang boleh dianggap wajar. Justru itu letak persoalannya. Pada hal sepele kita bisa ‘ber-

kompromi’ apalagi pada hal besar, mungkin saja kita akan kelak memaklumi korupsi.

Persoalan lainnya juga direkam dan disajikan secara apik oleh para sineas lain. Seperti budaya pungutan liar yang menjangkiti birokrasi dengan nama “Persenan”. Ini merujuk pada ‘jatah’ yang harus disetorkan bila masyarakat ingin mendapatkan layanan publik. Juga persoalan lainnya yang tak hanya berkaitan dengan budaya koruptif, tetapi juga situasi dilematis dalam menjaga integritas diri.

Nah, pada situasi pandemi seperti ini, tak membuat KPK berhenti. Meski ruang gerak terbatas, tak hanya produktivitas saja yang perlu dijaga, melainkan juga integritas. Itulah salah satu alasan, KPK kembali menyelenggarakan Festival Film Antikorupsi (Anti-Corruption Film Festival) yang ke tujuh kalinya pada tahun 2021.

Karena itu, tema “Bangkit Beraksi Berkreasi” dipilih dalam mendorong setiap elemen masyarakat untuk turut berbuat, yaitu ikut berpartisipasi dalam gerakan antikorupsi dengan cara kreatif melalui medium film.

Bagi KPK sendiri, film diyakini mampu menjadi strategi efektif dalam menanamkan integritas dan nilai antikorupsi kepada berbagai kalangan. Film antikorupsi tak sekadar menghibur, namun juga menyajikan pesan kebaikan untuk memberi perspektif, menggugah kesadaran dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat antikorupsi sekecil apapun dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam ACFFest 2021, ada lima kategori yang dikompromisikan, yakni film pendek fiksi/komedi, film pendek dokumenter, film pendek animasi dan kategori vlog dengan durasi maksimal 15 menit. Ada pula kategori ide cerita film, dimana masyarakat bisa mengusulkan ide cerita yang nantinya dipilih 10 ide terbaik. Ke-10 ide cerita ini mendapat bantuan dana produksi sebesar Rp30 juta dan mengikuti Movie Camp Online untuk mendapatkan pendampingan teknis dari para mentor profesional.

Sejak dibuka pada 1 September 2021, tercatat sebanyak 455 karya film dan 424 proposal ide cerita film datang dari Aceh hingga Papua. Ini bukti bahwa pandemi tak menyurutkan antusiasme masyarakat dalam menjaga produktivitas dan semangat melawan korupsi.

Bagi KPK yang lebih penting bukan hanya soal pesan antikorupsi dapat disampaikan dengan cara kreatif ini, melainkan juga soal keterlibatan masyarakat. Ya, ibarat bola salju yang terus bergulung dan terus membesar, KPK sangat membutuhkan partisipasi masyarakat dalam menanamkan kejujuran, memperbaiki sistem yang korup dan mengawal pembangunan agar Indonesia yang maju dan bebas dari korupsi, bukanlah sekadar impian.



# Terus Mengulik Partisipasi Publik

Pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab kita semua. Tak terkecuali masyarakat dengan beragam profesi dan peran di lingkungan sosial. Sebagai kekuatan kedua, masyarakat harus terlibat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Karena itu, semua lini, harus dibekali. Agar integritas meningkat, masyarakat juga harus terlibat. Terutama pada sektor strategis, seperti politik, dunia usaha, juga sosial kemasyarakatan.

## Program Pemberdayaan Masyarakat Antikorupsi



**141**  
Mitra terlibat

**15**  
Kegiatan

5 Provinsi; Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan

## Program PEMILU Berintegritas

### Program Penyelenggara Berintegritas



**4.402**  
Peserta

**6**  
Kegiatan

Komisioner KPU dari tingkat pusat hingga satker di provinsi/kabupaten/kota se-Indonesia.

### Program Pemilih Berintegritas



**117**  
Peserta

**4**  
Kegiatan

4 provinsi: Aceh, Gorontalo, Yogyakarta, Jawa Timur

## Program PARPOL Berintegritas

### Program Politik Cerdas Berintegritas (PCB)



**4**  
Partai Politik:  
PSI, PKS,  
Nasdem, PPP

**2.533**  
Kader  
Partai Politik

### Insersi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP)



**15**  
Partai Politik

## Sekolah Intensif Pemuda Antikorupsi



**2**  
Provinsi:  
Jawa Timur dan  
Kalimantan Tengah



**60**  
Peserta perwakilan organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan dan komunitas

## Program Desa Antikorupsi

### Indikator

1. Penataan Tatalaksana
2. Penguatan Pengawasan
3. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
4. Penguatan Partisipasi Masyarakat
5. Kearifan Lokal

## Program Dunia Usaha Berintegritas



**7**  
Kegiatan kolaborasi



**7**  
Kegiatan korporasi



**2.899**  
Peserta



# Desa Antikorupsi

Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta menjadi desa pertama yang menerima penobatan sebagai Desa Antikorupsi. Lurah Panggungharjo Wahyudi Anggoro Hadi memandang bahwa penobatan Desa Antikorupsi merupakan apresiasi yang dapat dijadikan sebuah penanda. Penanda bahwa upaya-upaya yang Panggungharjo lakukan telah berada pada jalur yang benar.

Latar belakang pemilihan desa sebagai sebuah ikon antikorupsi karena di desa kerap ditemukan tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala desa dan perangkat desa lainnya.

**2020** 141 Kasus Korupsi 132 Kepala Desa 50 Aparatur Desa

**2021** 62 Kasus Korupsi

Alasan mengapa kepala desa dan perangkat desa terlibat korupsi karena masih minimnya pemahaman terhadap pengelolaan keuangan dana desa dan kurangnya partisipasi masyarakat sehingga perangkat desa leluasa melakukan korupsi. Di Panggungharjo, alasan itu tidak ditemukan.

Panggungharjo malah memenuhi lima indikator Desa Antikorupsi menurut Buku Panduan Desa Antikorupsi;



**Penguatan  
Tata Laksana**



**Penguatan  
Pengawasan**



**Penguatan  
Kualitas Pelayanan  
Publik**



**Penguatan  
Partisipasi  
Masyarakat**



**Kearifan  
Lokal**

Sejak 2013, Panggungharjo sudah memiliki sistem data dan informasi desa, menciptakan lokasi wisata yang disebut "Kampoeng Mataraman" dengan pemasukan ratusan juta hingga miliaran per tahun.

Kini memiliki sistem pengendalian gratifikasi, mengimplementasikan keterbukaan informasi desa baik digital maupun konvensional, seperti adanya baliho anggaran belanja desa. Cara tersebut digunakan untuk menjangkau masyarakat yang belum melek digital.

Perjalanan Panggungharjo layak menjadi proyek percontohan dan peluncuran program Desa Antikorupsi. KPK berharap pada 2022 setiap provinsi di Indonesia memiliki minimal satu Desa Antikorupsi.

Program Desa Antikorupsi merupakan kerja sama KPK dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PanRB), Kementerian Keuangan, serta Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI). Dari kerja sama tersebut, tersusunlah Buku Panduan Desa Antikorupsi.

# Selamatkan Negeri Melalui Diksi



Sejak 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melatih para jurnalis, jurnalis warga, akademisi, hingga mahasiswa untuk memahami isu korupsi melalui Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi (AJLK). Mereka yang berasal dari berbagai penjuru negeri diajarkan bagaimana memahami isu korupsi dari berbagai perspektif, terutama dari sisi jurnalistik.

KPK menghadirkan lebih dari 20 pengajar, mulai dari praktisi jurnalistik, penyidik, aktivis, hingga psikolog. Meskipun kelas berlangsung tanpa tatap muka, 25 peserta ditahun ini tetap mengikuti 40 jam kelas intensif dengan maksimal.

Pandemi tidak menyurutkan semangat peserta untuk membuat tugas akhir. Setiap peserta memiliki keunggulan masing-masing dan menunjukan totalitasnya dalam proses pengerjaan tugas akhir. Beberapa peserta membuat karya jurnalistik dan karya ilmiah, namun ada juga peserta yang membuat kegiatan menarik seperti festival, pelatihan jurnalistik, lomba pantun hingga kelas antikorupsi khusus kaum disabilitas.

Melalui tugas akhir mereka, ratusan orang telah terpapar dengan isu antikorupsi. Artinya, mereka telah membantu tugas KPK dalam menyebarkan semangat antikorupsi dan menjadi trigger bagi masyarakat di daerahnya untuk terus mengawasi upaya pemberantasan korupsi. Mereka telah melakukan upaya penyelamatan negeri dengan cara yang cukup sederhana namun tak bisa dianggap remeh, yaitu melalui diksi.



Kunjungi video rangkaian kegiatan AJLK di Channel YouTube KPK:



# Mudahnya Mengakses Literasi Antikorupsi



Pandemi Covid-19 ternyata tak menyurutkan semangat pembaca untuk berkunjung langsung ke perpustakaan KPK. Hal ini terlihat dari jumlah pengunjung ke perpustakaan KPK yang cukup tinggi. Biasanya, dalam kurun waktu satu tahun perpustakaan KPK hanya menerima ratusan orang. Tahun ini, lebih dari 1.000 orang berkunjung langsung ke perpustakaan KPK.

Jumlah kunjungan tinggi di saat pandemi membuat kami berinovasi demi kemudahan proses peminjaman buku. KPK telah menggunakan teknologi Radio-Frequency Identification (RFID) agar pembaca bisa meminjam buku secara mandiri di saat petugas perpustakaan sedang bekerja di rumah.

Tahun ini kami juga mulai aktif untuk menyediakan fasilitas buku digital atau *e-book* bagi pegawai dan masyarakat umum. Hal ini kami lakukan demi memberikan kemudahan bagi setiap pembaca yang tetap ingin menyerap ilmu buku-buku koleksi perpustakaan KPK dari manapun



## Layanan Perpustakaan



<https://bukudigital.kpk.go.id/>

## E-Book



## Sarasehan Pustaka

- Sarasehan Pustaka "Peran Perguruan Tinggi dalam Pencegahan Korupsi" di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin pada 17 November 2021
- Sarasehan Pustaka "Pulihkan negeri melalui Nilai-nilai Antikorupsi" di Universitas Telkom, Bandung pada 22 November 2021

# PENCEGAHAN

Pandemi yang memasuki tahun kedua ternyata telah membuat kami terbiasa, mengupayakan perbaikan sistem dalam upaya pencegahan korupsi dengan cara-cara yang tak biasa. Melalui JAGA.id KPK terus menjadi wadah aduan masyarakat dalam distribusi bansos dan penanganan Covid-19.

Kami juga terus membantu Kementerian, Lembaga dan Pemerintah daerah menemukan risiko-risiko korupsi yang terjadi dan memberikan rekomendasi perbaikannya melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) yang masif di 2021, tentu

dengan terus didukung kajian sistem terhadap program-program Kementerian/Lembaga.

Kepatuhan dan Pelaporan Gratifikasi dan LHKPN pun terus diupayakan. Dan di 2021, kami hadir dengan tambahan direktorat baru yaitu Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) untuk menambah amunisi pencegahan korupsi pada sektor swasta.





## Monitor Sendi Negeri Lewat Tiap Sektor

Tugas monitor menjadi mandat kami dalam mengawasi sistem dan kebijakan lembaga negara dan pemerintah. Kewenangan ini jadi dasar kami dalam melaksanakan tugas mengkaji sektor-sektor strategis di negeri. Mulai dari sistem, hingga pada kebijakan yang berlaku. Semua dilakukan untuk kepentingan dan keuntungan masyarakat,

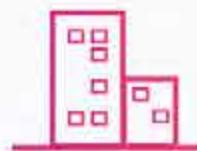
agar tiap sendi yang berpotensi korupsi sedini mungkin dapat dicegah dan tak menimbulkan kerugian yang masif. Tahun 2021, melalui Direktorat Monitoring, kami melakukan 28 kajian terhadap program yang digagas oleh Kementerian Lembaga.



## Sektor Kajian di 2021



Sektor Penerimaan Negara dan Penegakan Hukum



Sektor Infrastruktur dan Pangan



Sektor Energi dan SDA



Sektor Kesehatan



Sektor Publik

# 28 Kajian



# Dampingi Penanganan Pandemi

Pandemi covid-19 yang membuat babak belur, tidak menyurutkan kami melakukan monitoring terhadap program pemerintah agar tetap tepat sasaran dan terukur. Pada 2021, KPK terus melakukan kajian terhadap program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pelaksanaan vaksinasi hingga pengadaan barang dan jasa dalam program penanganan pandemi oleh pemerintah.

## **Kajian Program PEN Pariwisata**

Anggaran Rp3,3 Triliun yang menjangkau 101 Pemerintah daerah (Pemda) penerima bantuan menjadi latar belakang KPK melakukan kajian pada program ini. Hasil kajian menunjukkan pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang dilakukan oleh Pemda masih ditemukan beberapa PBJ yang tidak sesuai dengan peraturan. Selain itu, program tidak direncanakan dengan baik serta mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan program pariwisata masih belum maksimal.

KPK pun memberikan rekomendasi penyempurnaan regulasi dan pedoman pelaksanaan hibah pariwisata; mempertimbangkan efektivitas waktu untuk seluruh pengelolaan kegiatan; melibatkan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan; perbaikan dan penyederhanaan pemberian bantuan; Pemda menyelesaikan persoalan terkait pengadaan barang dan jasa; penguatan dalam mekanisme pengawasan; audit untuk mendapatkan Informasi mendalam terkait pelaksanaan program secara keseluruhan di Pemda.

## **Kajian Mitigasi Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Terkait Program Penanganan Covid-19 Di Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2021**

Fokus kajian dilakukan pada pengadaan RDT Antigen di Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) dan Reagen/Kit RT PCR Covid-19 di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbang Kesehatan) yang digunakan sebagai alat testing dan tracing penyebaran Covid-19.

KPK memberikan rekomendasi dengan meminta BPKP untuk melakukan audit investigatif terkait potensi kemahalan perolehan harga RDT Antigen di Ditjen P2P dan reagen PCR di Balitbang Kesehatan. Selain itu, KPK mendorong agar Kemenkes menyerahkan anggaran dan proses pengadaan ke Pemerintah Provinsi bagi barang yang akan digunakan oleh daerah, agar lebih efektif dan efisien. Kemenkes cukup memberikan panduan untuk standar kualitas barang yang akan dibeli.

## **Kajian Identifikasi Risiko Korupsi pada Pelaksanaan Vaksin Program dan Vaksin Gotong-Royong Covid-19**

Rp637,3 miliar telah dianggarkan pemerintah untuk membeli vaksin Covid-19 tahap awal. Pemerintah juga telah membuat komitmen dengan sejumlah produsen lain untuk memenuhi kebutuhan bagi 180 juta penduduk. Kajian ini kemudian mengidentifikasi sejumlah potensi korupsi atau fraud dalam program vaksinasi Covid-19 baik yang dilakukan secara gratis maupun berbayar (vaksin gotong royong).

KPK mendorong koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan dalam pembagian tugas dan porsi pembiayaan sehingga tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan pos anggaran vaksinasi Covid-19. Selain itu penggunaan NIK harus tetap digunakan sebagai basis pendataan penerima vaksin dan juga alat monitoring pelaksanaan vaksinasi di daerah



# Tak Lepas Monitor Bansos

Terbongkarnya kasus korupsi paket bantuan sosial dalam penanganan Pandemi Covid-19 Wilayah Jabodetabek yang menjerat Menteri Sosial kala itu, menambah luka untuk rakyat yang sudah terhimpit keadaan pandemi yang serba sulit.

Untuk pertama kalinya masyarakat pun menggugat. Sebagai korban langsung dari kasus korupsi, sebanyak 18 orang masyarakat menempuh jalur hukum dan menuntut ganti rugi atas perbuatan pejabatnya. Potongan sepuluh ribu untuk mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dari setiap paket Bansos yang mereka terima tentu sangat merugikan.

Meski gugatan tidak dikabulkan, upaya masyarakat menggugat kerugian akibat kasus korupsi ini menjadi percontohan bahwa masyarakat sebagai korban langsung dari korupsi berhak melakukan tuntutan kepada pelaku korupsi.

KPK sendiri tak lepas melakukan kajian dalam tata kelola bantuan sosial (Bansos) yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Pada 2020 KPK fokus mendorong pepadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), 2021 KPK menyoroti rencana pemutakhiran data DTKS secara terpusat oleh Kemensos.

KPK menemukan, terdapat inefisiensi dalam anggaran untuk program pemutakhiran tahun 2021 yang akan dilaksanakan terpusat oleh Kemensos sebesar Rp581 miliar dari total anggaran Rp1,3 Triliun. Rekomendasi KPK, Kemensos mengkaji ulang rencana tersebut dan pemutakhiran DTKS tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Atas rekomendasi tersebut, proses pemutakhiran DTKS secara terpusat tahun 2021 dibatalkan oleh Kementerian Sosial. Pemutakhiran DTKS tetap dilakukan Pemerintah Daerah dengan quality assurance (QA) dari Perguruan Tinggi sehingga inefisiensi anggaran sebesar Rp1,3 Triliun pada tahun 2021 menjadi dapat dicegah.

Melalui Kajian Tata Kelola Bantuan Sosial Reguler yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) menemukan pelaksanaan e-warong BPNT pada 10 kabupaten/kota sampel, diduga terdapat potensi kemahalan harga sebesar Rp222,65 Milyar/tahun.

Selain itu, diduga terdapat pengendapan dana bansos sebesar Rp1,338 Triliun pada kartu penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) se-Indonesia selama 3-12 bulan yang mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan bunga dan tidak dapat segera dialihkannya dana bansos tersebut untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pengganti.

KPK kemudian memberikan rekomendasi agar dilakukan perbaikan mekanisme BPNT yang memberi keleluasaan pembelanjaan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Perbaikan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kemensos dengan bank penyalur terkait meka-

nisme penyaluran BPNT dan PKH untuk menghindari pengendapan dana pada bank penyalur (Himbara).

## Potensi Penyelamatan

Kajian Tata Kelola  
Bantuan Sosial 2020

**Rp1,3 Triliun**

**Rp1.522,65 Triliun**

Kajian Bansos Reguler: PKH & BPNT

**Rp222,65 Miliar/  
tahun**



# Mengkaji Sektor Keuangan Negara

Pajak terus menjadi perhatian karena menjadi sumber pendapatan terbesar yang juga rentan dikorupsi. Melihat besarnya kontribusi sektor perpajakan yang mencapai 80% dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, KPK pun turut serta mengawal optimalisasi penerimaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pada 2021, KPK dan DJP menandatangani Perjanjian Kerja sama (PKS) untuk fokus mengawal optimalisasi pajak di sektor perkebunan sawit (lokus Provinsi Riau) dan sektor pertambangan nikel (lokus di Sulawesi).

## Temuan:

KPK menemukan adanya perbedaan luasan izin perkebunan yang dikeluarkan oleh Pemda berupa IUP (Izin Usaha Perkebunan) maupun STD-B (Surat Tanda Terdaftar - Budidaya) dengan luasan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.833/2019 tentang Penetapan luas tutupan kelapa sawit tahun 2019 dimana Provinsi Riau mencatatkan luasan 3.38 juta Ha.

Disamping itu juga terdapat selisih luasan hasil sanding data IUP Pemda dengan data DJP data luasan pengenaan pajak PBB dengan kriteria IUP lebih besar dari data pajak dan IUP dengan data NOP (Nomor Objek Pajak) yang belum teridentifikasi sebesar 373 ribu Ha dengan potensi penerimaan pajak terhutang PBB P5L sebesar Rp132,578 M.

## Rekomendasi:

### Direktorat Jenderal Pajak:

- Menindaklanjuti selisih luasan 373 ribu Ha atas kerjasama optimalisasi KPK-Ditjen Pajak dan memberikan pelaporan berkala kepada KPK;
- Melakukan perbaikan mekanisme pendaftaran, pelaporan dan pendataan objek pajak PBB melalui SPOP.

### Pemda:

- Melakukan pemetaan atas data tutupan sawit (Keputusan Menteri Pertanian 833/2019) berdasarkan data perizinan, STDB dan data lain yang relevan;
- Percepatan penyelesaian PITT (Peta Indikatif Tumpang Tindih) IUP dalam kawasan hutan dengan pelibatan para pihak di bawah Stranas-PK.



# Memastikan Keadilan di Lembaga Peradilan

Kajian ini dilakukan berkat kerjasama yang baik antara Badan Pengawasan MA, KPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain itu, Mahkamah Agung (MA) merupakan pintu gerbang terakhir dalam pencarian keadilan lewat kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Kajian ini dilakukan untuk mengidentifikasi risiko korupsi dalam sistem manajemen perkara MA serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencegah korupsi.

## Temuan :

Hasil kajian menunjukkan beberapa permasalahan yaitu persoalan dalam proses penunjukan majelis hakim, penyelesaian eksekusi yang berlarut-larut, beban kerja hakim dalam suatu pengadilan maupun antar pengadilan tidak merata, permasalahan terkait akuntabilitas keuangan, proses pertukaran data melalui SPPT-TI belum terselenggara di beberapa pengadilan hingga permasalahan terkait pengendalian intereksi antara petugas dan para pihak.

## Rekomendasi :

- Setiap penugasan hakim termasuk perubahannya agar didukung dengan administrasi yang memadai.
- Penetapan kebijakan tentang standar waktu tiap-tiap tahapan penyelesaian eksekusi perkara perdata serta dibuatnya Nota Kesepahaman dengan Kepolisian untuk penyepakatan biaya pengamanan eksekusi perkara perdata.
- Pemetaan jumlah hakim dan jumlah perkara pada setiap jenis peradilan agar dapat dijadikan dasar pembuatan kebijakan distribusi hakim yang lebih merata.
- Pembuatan sistem pengembalian/transfer sisa panjar langsung ke rekening penyettor dan fitur monitoring akuntabilitas panjar.
- Pertukaran data antara aparat penegak hukum dapat segera dilakukan baik di tingkat pusat dan daerah.
- Penyusunan dan pengusulan anggaran pengadaan CCTV di lokasi strategis, penyusunan kebijakan yang mengatur standar dan tata cara dokumentasi rekaman CCTV, serta penetapan tanda area steril dan pengaturan penerimaan tamu.

# Survei Penilaian Integritas yang Konstruktif



Pada 2021, KPK melakukan Survei Penilaian Integritas (SPI) secara masif. Survei ini bertujuan untuk mengukur risiko korupsi di suatu kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (K/L/PD). Dengan jumlah partisipan yang besar, serta cakupan pelaksanaan survei di hampir seluruh K/L/PD, SPI 2021 menjadi survei korupsi terbesar yang dilaksanakan di Indonesia. Tujuannya jelas, untuk memberikan peta perbaikan sistem antikorupsi di K/L/PD masing-masing.

Survei ini dilakukan KPK sejak 2014 dengan mengadopsi survei integritas Korea Selatan, kami terus berupaya memperbesar cakupan partisipasi responden agar rekomendasi yang dihasilkan lebih terarah dan terukur. SPI memiliki keunggulan berupa kombinasi persepsi, pengalaman, dan data obyektif seperti ada tidaknya pengusulan kasus di instansi tersebut yang ditandai dengan penerbitan surat pemberitahuan dimulainya

penyidikan (SPDP) oleh penegak hukum. Kami juga menggabungkan sudut pandang internal, eksternal, eksper

Penilaian SPI 2021 mencakup transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (trading in influence), pengelolaan anggaran, pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, pengelolaan Sumber Daya Manusia dan sosialisasi antikorupsi di setiap instansi. Semakin tinggi angka integritas sebuah instansi, maka sistem yang berjalan di K/L/PD dalam mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi juga semakin baik.

## Survei Penilaian Integritas



**7.647**

Eksper: BPK, BPKP, Ombudsman, Media dll

**62.924**

Eksternal: penerima layanan/peri-zinan, mitra kerja sama/vendor, dll

**154.439**

Internal: pegawai di instansi tersebut



**255.010**

Partisipan

**508**

Pemerintah kabupaten/kota

**34**

Provinsi

**98**

kementerian/lembaga

\*Kabupaten Niduga, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya, dan Yalimo tidak dapat disurvei penghitungan indeks lantaran kondisi keamanan di sana tidak kondusif.

# Survei Penilaian Integritas

Meski indeks melampaui target nasional, SPI melihat bahwa risiko korupsi ditemukan hampir di seluruh instansi peserta SPI. Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa (PB.J) bahkan masih ditemukan di 100% instansi. Penyalahgunaan fasilitas kantor, korupsi dalam promosi/mutasi SDM dan intervensi (trading in influence) masih ditemukan di 99% instansi. Sementara suap/gratifikasi juga ditemukan di 98% instansi.

Menurut 15% responden internal (pegawai) meyakini risiko suap/gratifikasi ditemui di banyak instansi. Hal ini juga diyakini oleh 5% dari responden eksternal dan 18% responden eksper. Risiko adanya perdagangan pengaruh (trading in influence) juga ditemukan di banyak instansi. Sekitar satu dari empat responden internal berpendapat keberadaan risiko trading in influence dalam bentuk penentuan program dan kegiatan, perizinan, hingga penentuan pemenang pengadaan pemerintah.

Berdasarkan 29% responden pegawai (internal), permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa juga ditemukan di berbagai instansi, berupa nepotisme hingga gratifikasi. Selain itu, satu

dari dua pegawai menyatakan pemanfaatan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi pun masih marak terjadi di hampir seluruh instansi. Hal ini juga dikonfirmasi oleh 29% responden eksper. Sembilan persen dari responden pegawai juga menilai bahwa penyalahgunaan anggaran dalam perjalanan dinas masih terjadi di berbagai instansi peserta SPI 2021.

Sementara itu 16% responden internal mengaku masih terdapat jual beli jabatan di instansinya. Sebanyak 31% karena ada hubungan kekerabatan, 35% karena kedekatan dengan pejabat dan 25% karena kesamaan almamater. SPI juga menyoroti risiko penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas dimana 18% eksper menyatakan bahwa terdapat risiko penyalahgunaan anggaran di K/L/PD.

KPK pun memberikan laporan dan rekomendasi khusus kepada setiap K/L/PD sesuai dengan permasalahan dan kejadian korupsi yang ditemukan di instansinya. Laporan dan rekomendasi ini menjadi panduan instansi untuk melakukan perbaikan sesuai dengan risiko korupsi yang ada di instansinya.

## Indeks Integritas





# Mendorong Transparansi Lewat Laporan Harta Kekayaan

Wujud transparansi berbeda-beda. Bagi Penyelenggara Negara (PN), ialah bagaimana agar secara transparan berani melaporkan harta kekayaan mereka.

Tiap tahun, KPK terus mendorong peningkatan kepatuhan laporan dari para PN yang menjadi Wajib Laport. Tentu tidak sekadar untuk rutin melaporkan, tapi supaya isi laporan dapat dengan benar terverifikasi.

Usaha mendorong kepatuhan yang dilakukan beragam, mulai dari sosialisasi terkait peraturan LHKPN, bimbingan teknis untuk Unit Pengelola dan Wajib LHKPN. Hasilnya, pelaporan di 2021 meningkat menjadi **97,35%**.

## Tingkat Kepatuhan

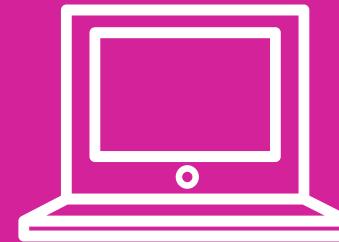
2021  
**97,35%**

2020  
**96,3%**

2019  
**93%**

**377.184**  
Wajib  
Lapor

**367.187**  
Telah  
Lapor



**699.573 kali** Jumlah Akses Halaman  
E-Announcement



**228 Kegiatan**

**65** Kegiatan Bimbingan  
Teknis Luring

**119** Kegiatan Bimbingan  
Teknis Daring

**44** Rapat Kerja

# Peluru Baru Dunia Usaha

Komisi Pemberantasan Korupsi membentuk Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) di bawah Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring berdasarkan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK.

Direktorat Antikorupsi Badan Usaha mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan melaksanakan pencegahan korupsi melalui pembangunan budaya kerja, regulasi dan sistem serta pelaksanaan akreditasi antikorupsi.



## Forum Komunikasi Pemerintah - Pengusaha

Menyadari pentingnya komunikasi yang baik antara Pemerintah dan pelaku usaha, KPK membentuk Komite Advokasi Daerah (KAD). Forum ini ditujukan untuk membahas isu-isu strategis terkait upaya pencegahan korupsi dan menemukan solusi bersama. Pada 2021, KPK telah melakukan diskusi dengan KAD di 34 Provinsi untuk memetakan area rawan korupsi di sektor infrastruktur, kesehatan, pangan, minyak dan gas, kehutanan dan keuangan.

## Cegah Korupsi Dunia Usaha

Sepanjang 2021, Direktorat AKBU telah melakukan 151 kegiatan antara lain sosialisasi pencegahan korupsi pada dunia usaha, baik di BUMN, BUMD, swasta maupun asosiasi. Pada 2021, KPK juga telah melaksanakan webinar dengan tema "Mencegah Korupsi: Mengiskis Suap di Perizinan Perumahan."

## Dorong Dunia Usaha yang Antikorupsi

Demi mewujudkan dunia usaha yang anti suap, KPK melakukan penandatanganan MoU bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada November 2021. Ruang lingkup dalam MoU tersebut meliputi:

1. Pertukaran informasi dan data
2. Pencegahan tindak pidana korupsi
3. Pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi
4. Sosialisasi dan kampanye
5. Pelaksanaan dan penerapan hasil kajian penelitian, dan
6. Kegiatan lain berkaitan dengan program pemberantasan korupsi di sektor yang disepakati oleh para pihak

Mulai aktif bekerja pada Januari 2021, berbagai kegiatan telah dilaksanakan oleh Tim Satuan Tugas (Satgas) AKBU

## Implementasi SMAP pada Dunia Usaha

KPK telah menyusun Panduan Cegah Korupsi (PanCEK) yang menjadi salah satu jenis Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi menjadi cikal bakal disusunnya PanCEK KPK. Hingga 2021, sudah ada beberapa badan usaha baik BUMN dan Swasta yang telah menerapkan PanCEK KPK yakni diantaranya PT Bank Tabungan Negara, PT Bank Rakyat Indonesia, dan PT Hutama Karya.

# Laporkan Gratifikasi Agar Tak Balas Budi

Gratifikasi bukan hadiah. Ada upaya menanamkan budi yang tak terbatas oleh si pemberi kepada penyelenggara negara terkait jabatannya. Menolaknya jadi pilihan terbaik. Tapi saat tak kuasa menolak karena berbagai kondisi, laporkan segera agar tak jadi perkara. KPK pun terus berupaya meningkatkan kesadaran penyelenggara negara agar menolak atau melaporkan gratifikasi. Upaya ini dilakukan melalui berbagai sosialisasi dan bimbingan teknis atau pelatihan terkait kewajiban melaporkan gratifikasi.

KPK telah menerima sebanyak

**2.127**  
laporan

senilai total

**Rp.8**  
Miliar

Data Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik per 31 Desember 2021

**931**  
laporan

dinyatakan sebagai milik negara

**Rp.2,4**

Miliar

telah disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan bukan pajak (PNBP)

Asal Laporan :

**320**

pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota

**70** **32**

BUMN/BUMD kementerian

**61**

lembaga negara/pemerintah

Jenis gratifikasi yang paling banyak dilaporkan selama 2021:

Uang/tantara (uang sebanyak)

**995**  
Laporan

Barang

**854**  
Laporan

Makanan atau barang yang mudah busuk

**380**  
Laporan

Pada 2021 terjadi kenaikan pelaksanaan gratifikasi melalui aplikasi GOL, UPG dan GOL Inovasi. Hal ini menunjukkan upaya KPK mempermudah pelaporan di masa pandemi melalui aplikasi online membuahakan hasil yang positif. *Sumber: Laporan Gratifikasi per 31 Desember 2021*



**1290**  
Laporan

Aplikasi GOL UPG



**525**  
Laporan

Aplikasi GOL Individu



**214**  
Laporan

E-Mail



**68**  
Laporan

surat/pos



**16**  
Laporan

WA/lainnya



**14**  
Laporan

Datang langsung

Kegiatan

- Sosialisasi Gratifikasi melalui 6 program Gratifikasi Talk (G-talk) yang total diikuti 4.239 peserta.
- Diskeminasi dilakukan melalui 84 prosedural konten/materi anti gratifikasi serta melalui 112 placemat di kantor anti gratifikasi.
- E-Learning Pengendalian Gratifikasi diikuti 123.040 peserta.
- Rencan GOL UPG revisi 83 UPG KLDP.
- Kegiatan Pelatihan kepada Penyuluh Agama dan B. Agama di Indonesia yang diikuti 50 peserta.
- UPG development program dilakukan dengan melibatkan sebanyak 734 peserta yang merupakan pengurus UPG.



# Agar Tak Terjebak Gratifikasi

Hati-hati dengan pemberian seseorang, terlebih pemberian untuk pejabat yang punya kewenangan. Pemberian itu bisa jadi hadiah, bisa juga gratifikasi. Hadiah dan gratifikasi, bagi sebagian orang dianggap sama, beda tipis kata yang lain.

Tapi bagi mereka yang berani menolak dan melaporkan setiap pemberian, hadiah dan gratifikasi jelas dua hal berbeda. Laporan dulu, agar jelas apakah pemberian itu hadiah atau pemberian itu gratifikasi. Seperti 3 penyelenggara negara berikut. Nurani mereka berkata, ini bukan hadiah. Tak ingin terjebak gratifikasi dalam bertugas, mereka penuh tekat melaporkan pemberian yang diterimanya ke KPK.



## Aisyah

Kepala Desa Sungup Kanan, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kotabaru, Kalimantan Selatan

Aisyah merupakan Kepala Desa Sungup, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kotabaru Kalimantan selatan. Sebagai kepala desa, Aisyah kerap membenkan pembinaan terkait pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban. Ia juga berupaya melindungi warga desanya dari berbagai hal yang dianggap merugikan warga.

Pada tahun 2020, terjadi sengketa tanah antara sejumlah warga desa dengan salah satu perusahaan tambang batubara. Sengketa bermula dari overlapping antara sejumlah tanah milik warga Desa Sungup Kanan dengan sertifikat hak pakai atas nama perusahaan. Selaku kepala Desa Sungup Kanan, Aisyah berupaya melindungi hak warga desanya untuk meminta ganti rugi. Ia melaporkan masalah yang terjadi dan menginisiasi mediasi warga dengan pihak perusahaan di Kantor Pertanahan (BPN) Kotabaru.

Beberapa hari kemudian, salah satu perwakilan perusahaan yang tidak dikenal Aisyah datang menemuinya. Perwakilan perusahaan itu membicarakan keinginannya mengganti rugi lahan-lahan warga desa yang belum dibebaskan dan meminta Aisyah untuk mengumpulkan data-data terkait masalah tersebut. Ketika hendak pulang, perwakilan perusahaan memberi Aisyah sebuah kantong plastik hitam yang katanya titipan dari perusahaan. Kantong itu ditinggalkan di meja ruang tamu Aisyah sebelum pemberi bergegas pergi

Aisyah merasa tidak nyaman karena kantong plastik hitam itu ternyata berisi uang tunai Rp50 juta. Ia semakin tidak tenang mengingat banyak warga desanya yang kesusahan dan kesulitan akibat sengketa lahan itu. Bertekad untuk mengembalikan uang tersebut, Aisyah terus berusaha menghubungi Pemberi untuk mengembalikan uang sekaligus memberikan berkas ganti rugi. Namun, nomor teleponnya sudah diblokir Pemberi.

November 2020, Aisyah pergi ke Pengadilan Negeri Kotabaru, bermaksud menitipkan uang tersebut. Namun, pihak Pengadilan Negeri Kotabaru menolak karena bukan ranah pengadilan dan menyarakannya melaporkan penerimaan tersebut ke KPK di Jakarta.

Aisyah yang saat itu belum memahami tata cara pelaporan gratifikasi secara online, mengumpulkan uang untuk berangkat ke Jakarta. Walau kesulitan mengumpulkan biaya perjalanan dan menemui sejumlah kendala perjalanan di tengah kondisi Covid-19, ia tiba di Jakarta. Dengan tekat yang kuat dan biaya sendiri, Aisyah menempuh perjalanan sejauh 1944 Km dari desanya. Aisyah menyampaikan langsung laporan pemberian yang diterimanya dengan datang langsung ke Gedung Merah Putih KPK. Setelah menyampaikan uang yang diterimanya ke KPK, Aisyah pulang dengan perasaan tenang.



## Khaerullah

Tenaga Administrasi SDN  
Panunggan 4 Cibodas, Tangerang

Khaerullah merupakan tenaga administrasi pada SDN Panunggan 4 Cibodas, Tangerang, yang masih berstatus honorer. Sebagai honorer, ia menerima gaji dari anggaran daerah (APBD). Walau berstatus honorer, integritasnya sungguh tak terbatas. Pada masa pandemi Covid-19, Khaerullah berinisiatif mengajukan bantuan siswa untuk membantu orang tua yang mengalami kesulitan ekonomi akibat terkena PHK dan tak menerima BLT maupun bantuan lainnya. Usahanya membuahkan hasil, 100 orang siswa mendapatkan bantuan, masing-masing uang sebesar Rp450.000 dari Program Indonesia Pintar (PIP). Para orang tua murid merasa sangat terbantu, karena pengajuan bantuan dana tak bisa dilakukan secara mandiri, harus secara kolektif dari pihak sekolah. Dana itu kemudian digunakan untuk membeli keperluan sekolah putra-putri mereka yang masih harus belajar di rumah karena pandemi.

Merasa terbantu, para orang tua murid kemudian berinisiatif menggalang dana sukarela sebagai tanda terima kasih atas bantuan Khaerullah. Pada bulan Agustus 2021, hasil patungan dana terkumpul sebesar Rp1.000.000 dan diberikan pada Khaerullah.

Pada awalnya Khaerullah merasa ragu apakah uang tersebut boleh diterima atau tidak. Kemudian ia berinisiatif mencari informasi perihal gratifikasi dan aturan lapor gratifikasi. Akhirnya ia memutuskan untuk mengembalikan uang tersebut dan menyampaikan laporan penolakan kepada KPK. Laporan penolakan gratifikasi disampaikan melalui aplikasi GOL individu.

Selain itu Khaerullah juga menunjukkan komitmennya untuk tidak menerima gratifikasi dengan membuat surat pernyataan bahwa ia akan menolak gratifikasi dalam bentuk apapun terkait tugas yang diembannya.



## Anggi Wicaksono

Staf Teknis Imigrasi, Konsulat Jenderal RI Jeddah

Anggi Wicaksono merupakan staf teknis imigrasi yang bertugas memberikan layanan dalam pengurusan visa dan affidavit pada Kantor Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Jeddah. Pada bulan Juni 2021, ia melayani seorang WNI yang datang bersama anaknya ke Loket pelayanan untuk menerima visa dan affidavit yang telah selesai diproses.

WNI tersebut kemudian meminta petugas loket layanan untuk bisa bertemu dengan Anggi Wicaksono sebagai pejabat yang bertugas membubuhkan tandatangan pada visa tersebut. Saat mendengar permintaan untuk bertemu itu, Anggi berfikir mungkin terdapat kesalahan dalam pengurusan visa WNI tersebut. Ia kemudian bersedia melakukan pertemuan.

Ternyata maksud pertemuan yang diinginkan WNI tersebut untuk menyampaikan terima kasih atas pelayanan visa dan affidavit yang diperolehnya. Si WNI kemudian meminta putrinya untuk menyerahkan hadiah bingkisan kepada Anggi sebagai tanda terima kasih atas pengurusan visa suami dan anaknya yang berkewarganegaraan Arab Saudi.

Saat itu Anggi tak kuasa menolak pemberian dari anak kecil tersebut. Selain itu WNI itu juga tidak berkenan apabila pemberiannya dikembalikan. Setelah dibuka, bingkisan itu berisi sebuah arloji bertuliskan Rolex tipe Oyster Perpetual Datejust. Jika barang tersebut asli, nilai estimasinya berkisar Rp163.000.000. Namun apabila jam tangan bukan barang asli, diperkirakan senilai Rp4.106.700.

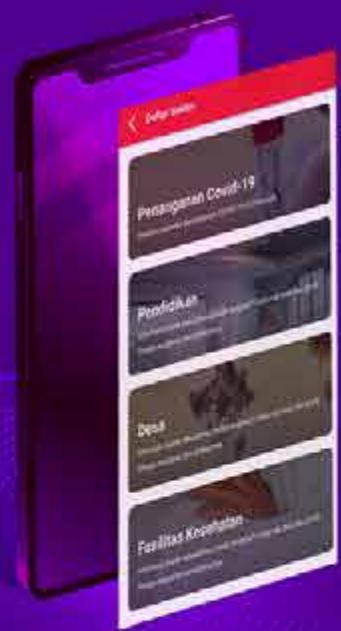
Anggi sempat bingung bagaimana melaporkannya ke KPK. Kemudian ia mengetahui bahwa di Konsulat Jenderal RI Jeddah terdapat suatu satuan tugas yang memang bertugas untuk menerima laporan gratifikasi. Sehingga ia memutuskan melaporkan pemberian tersebut pada Satuan Tugas Anti Gratifikasi Konsulat Jenderal RI di Jeddah.

Anggi bersedia menyerahkan arloji yang diterimanya kepada KPK. Saat ini arloji itu masih disimpan dalam pengawasan Satuan Tugas Anti Gratifikasi Konsulat Jenderal RI di Jeddah, serta menyampaikan laporan penerimaan.

# Inovasi Cegah Korupsi

**jaga** JARINGAN PENCEGAHAN KORUPSI

Sejak dirilis pada 2016, KPK terus mengembangkan platform Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA) guna meningkatkan kualitas layanan publik (sektor Pendidikan, Desa, Fasilitas Kesehatan, Perizinan, Anggaran, dan Penanganan Covid-19), juga informasi seputar program pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK. JAGA hadir menjawab tantangan era digital 4.0 untuk mendukung terwujudnya *open government* dan *empowering citizen*.



**108.900** akun terdaftar per 31 Desember 2021

**11.521.156** hit pada web dan aplikasi dalam setahun

**1.257** laporan pada web dan aplikasi dalam setahun yang disampaikan oleh masyarakat melalui fitur JAGA periode 1 Januari-31 Desember 2021

**205** laporan telah selesai,  
**370** keluhan diteruskan ke instansi terkait  
**34** sedang ditindaklanjuti  
**167** keluhan Covid-19  
**481** statusnya tidak direspons pemda/tidak direspons pelapor/menunggu konfirmasi pelapor

Sejak Mei 2021 JAGA menambah menu baru yaitu JAGA "Penanganan Covid-19" dan telah menerima sebanyak 167 laporan. Dalam menu ini tersedia literasi dan kanal keluhan bagi masyarakat untuk menyampaikan permasalahan yang ditemui terkait penanganan Covid-19, serta menyediakan informasi ringkas terkait pencegahan korupsi pada penanganan Covid-19 secara umum yaitu:



**Biaya penanganan pasien Covid-19**



**Insentif dan santunan tenaga kesehatan**



**Klaim rumah sakit**



**Vaksinasi**

Fitur Penanganan Covid-19 ini dapat diakses melalui aplikasi JAGA dengan mengunduh di PlayStore atau AppStore serta di laman situs web <https://jaga.id>

Pada 2021, JAGA juga menyelenggarakan kompetisi data pelayanan publik pertama yaitu JAGA DATA Challenge (JDC) 2021 serta JAGA Mascot Challenge 2021 di mana Tups (Tangan Jujur Pencegah Korupsi) terpilih sebagai maskot JAGA.

Hai Sahabat JAGA, Kenalin Aku **TUPS!**  
Nama TUPS merupakan akronim dari "**T**angan **J**ujur **P**encegah korup**S**i"  
Bentuk dasar dari maskot ini terinspirasi dari bentuk tangan dan slogan JAGA yaitu Cegah Korupsi Dari Ujung Jari



Unduh **JAGA** di gawai mu atau klik [jaga.id](https://jaga.id)



Mr. Tups

# Bersama Selamatkan Aset Negara

Seyogyanya usaha dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kami tidak akan dapat bekerja secara parsial dan sendiri. Perjalanan masih panjang dalam menggarap potensi penyelamatan keuangan negara, tetapi bantuan dari segenap elemen bangsa jadi kunci untuk mengentaskan Indonesia dari rasuah.

Untuk itu, kami berkoordinasi dengan berbagai pihak: Pemerintah Daerah, BUMD, BUMN, serta lembaga lainnya. Salah satunya soal penyelamatan keuangan negara maupun daerah. Berbagai upaya ditempuh untuk bisa dikembalikan

dan dimanfaatkan oleh negara atau daerah: sertifikasi aset, pemulihan dan penertiban aset daerah, realisasi aset PSU (prasarana, sarana, dan utilitas), dan piutang pajak daerah yang berpotensi tak tertagih.



**542**

Pemda yang KPK dampingi dalam penyelamatan aset



**96.065**

Total aset yang diselamatkan

**Rp118 Triliun**  
Total Penyelamatan Aset

**Rp53,6 Triliun**  
Sertifikasi Aset

**Rp49,9 Triliun**  
Realisasi Aset PSU

**Rp8 Triliun**  
Pemulihan dan Penertiban Aset Daerah

**Rp6,3 Triliun**  
Piutang Pajak Daerah Yang Berpotensi Tak Tertagih

Data Per 31 Desember 2021



**Nawawi Pomolango**

Pimpinan KPK – Jakarta, Desember 2021

Kami berharap dukungan semua pihak untuk terus mendukung penertiban aset di daerah. Jadikan Direktorat Korusup (Koordinasi dan Supervisi) Wilayah ini sebagai mitra, karena kunci keberhasilan adalah komitmen yang sama dalam pemberantasan korupsi.



**Sofyan A. Djali**

Menteri ATR/Kepala BPN

Kepedulian KPK ini sangat efektif dalam percepatan penatakelolaan aset negara. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan praktik korupsi di masa yang akan datang. Diharapkan Indonesia akan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) apabila penatakelolaan aset sudah lebih baik; maka upaya-upaya korupsi akan menjadi lebih sulit.



**Samsuddin A. Kadir**

Sekda Provinsi Maluku Utara

Dengan kehadiran Kepala tim Korusupah KPK RI dapat memperkuat upaya kami dalam menyelesaikan persoalan ini. Tim Korusupah KPK RI dapat memberi arahan dan langkah-langkah strategis dalam rangka upaya penyelamatan aset ini dan selanjutnya kami akan segera menindaklanjuti sesuai arahan tersebut.

# Jadi Jembatan Atasi Permasalahan

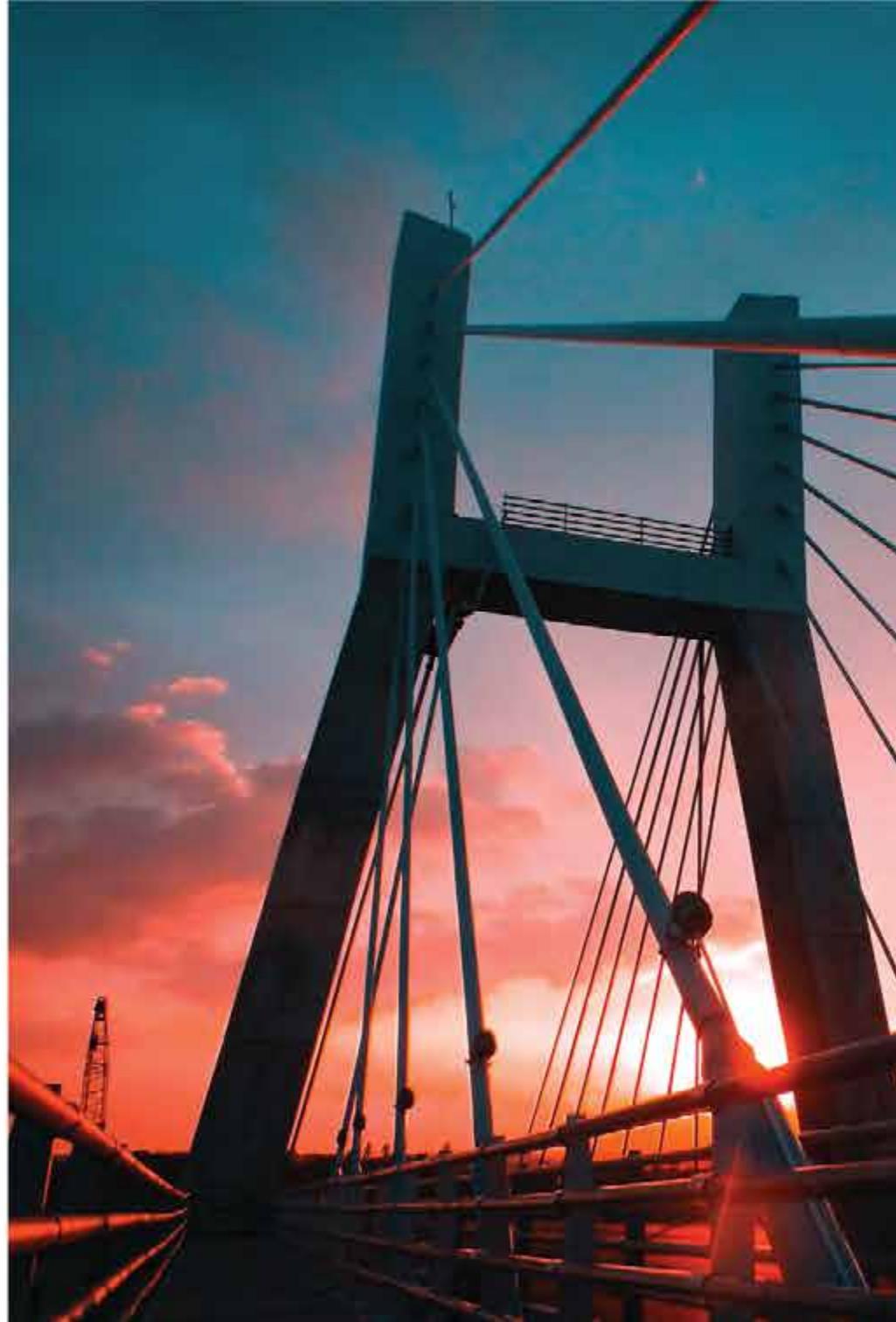
Terbang dari satu daerah ke daerah lain menjadi hal yang lumrah bagi tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK. Upaya mendampingi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penertiban dan penyelamatan aset menjadi salah satu tugas besar yang diemban tim Korsup KPK. Misinya tentu saja, agar setiap aset milik negara dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negara dengan sebaik-baiknya.

Salah satu lembaga yang KPK bantu dalam penertiban aset melalui sertifikasi aset tanah adalah PLN yang memiliki aset tanah hampir di seluruh wilayah Indonesia. Sejak 2020, total 38.499 sertifikat tanah milik PLN berhasil diterbitkan. Upaya ini dapat berjalan tentu berkat kolaborasi yang baik dengan Kementerian

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Melalui kolaborasi strategis tersebut, sertifikasi aset tanah milik PLN dapat dilakukan dengan cepat dan tentu saja dengan menghindari upaya-upaya koruptif yang kerap terjadi dalam proses penerbitan sertifikat tanah.

Namun bukan tanpa masalah, proses sertifikasi aset juga kerap menghadapi hambatan. Seperti terdapat penolakan dari masyarakat setempat yang merasa terusik dengan upaya penertiban aset. Ini sempat terjadi saat proses pengukuran tanah aset PLN di salah satu wilayah di Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Masyarakat setempat menolak dengan mendatangi tim yang sedang bertugas di lapangan. Menge-



tahui risiko yang akan dihadapi jika tim di lapangan nekat melawan, KPK pun melakukan pendekatan kepada tokoh adat setempat agar proses sertifikasi aset tanah dapat diselesaikan.

Komunikasi yang baik dengan tokoh adat rupanya kunci dari permasalahan tersebut, mengingat warga di daerah tersebut sangat menghormati tokoh adanya. Namun ada syarat yang harus dipenuhi jika ingin pekerjaan yang dilakukan selesai. Pihak yang berkepentingan dalam hal ini PLN harus mau membiayai pelaksanaan upacara adat saat proses penertiban aset-aset PLN selesai di wilayah mereka.

Bagi KPK sendiri, penataan aset tanah menjadi prioritas penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Khususnya di lingkup Kementerian, Lembaga maupun BUMN, KPK mendukung penuh langkah pengamanan aset negara agar bisa dimanfaatkan sebesar besarnya bagi masyarakat.

PLN pun berterima kasih atas dukungan dan kolaborasinya dengan KPK dalam mengamankan, memelihara, sekaligus mendayagunakan aset-aset yang dipercayakan kepada PLN agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang korup.

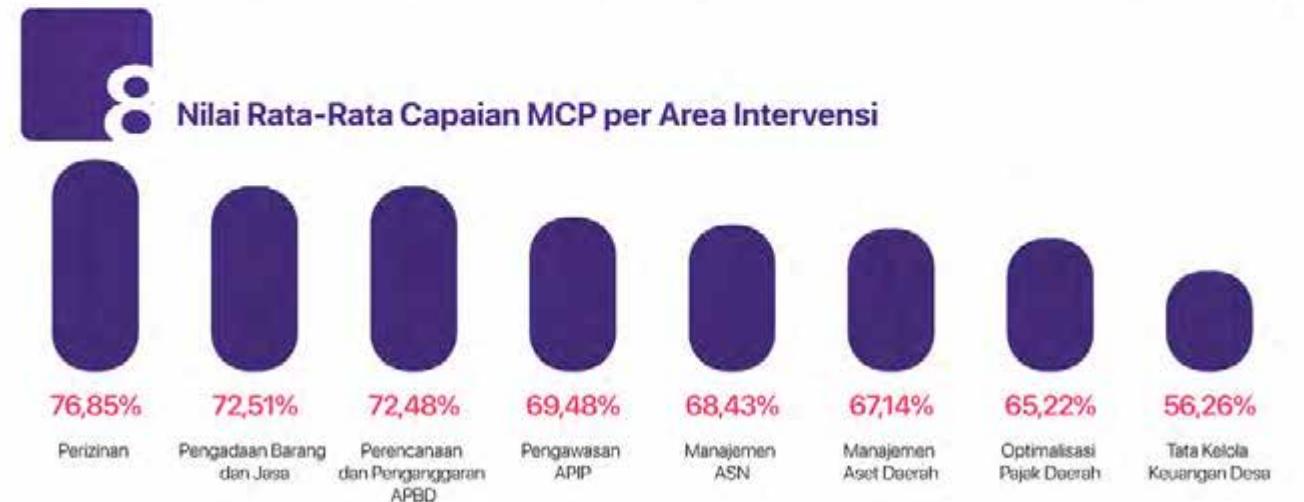
# Mengawal Daerah Agar Antikorupsi

Untuk terus memonitor informasi capaian program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dilaksanakan daerah, KPK terus mengembangkan aplikasi Monitoring Control for Prevention. Jika selama ini MCP diakses lewat laman korsupgah.kpk.go.id, saat ini MCP lebih mudah diakses lewat aplikasi JAGA.ID.

Sebelumnya KPK telah memetakan delapan area intervensi pada pemda yang menjadi fokus pencegahan korupsi yang dimuat dalam aplikasi MCP. Delapan fokus tersebut adalah perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola dana desa.

Dengan hadirnya MCP pada aplikasi jaga.id tersebut, pemerintah daerah bisa menyampaikan laporannya tanpa harus menunggu tim dari KPK datang untuk melakukan monitoring. Aplikasi ini juga dapat memudahkan pemerintah daerah melaksanakan "self assessment".

Selain itu, Humas Pemda dan Media Lokal dapat memanfaatkan MCP pada aplikasi Jaga.id untuk mengecek perkembangan komitmen Pemda dalam Tata Pemerintahan yang Baik. Melalui aplikasi ini semua daerah bisa terpetakan. Baik dari sisi perbaikan tata kelola pemerintahan maupun juga penyelamatan keuangan dan aset daerah. Berdasarkan catatan KPK sepanjang 2021, terdapat 10 pemerintahan daerah dengan capaian MCP terbesar.



# Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi

## Sinergi Selamatkan Negeri

Bersama Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) KPK terus berupaya melaksanakan program pencegahan korupsi di berbagai sektor. Salah satunya dengan melakukan pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di 10 kawasan pelabuhan utama yang berkontribusi pada turunnya biaya dan waktu layanan pelabuhan. Upaya ini membuat proses investasi

di dunia usaha menjadi lebih mudah. Sebagai koordinator Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), KPK pun terus memastikan Pelaksanaan 12 Aksi Pencegahan Korupsi 2021-2022 yang melibatkan 48 Kementerian/Lembaga, 34 Provinsi, dan 57 Kabupaten/Kota dapat berjalan dengan baik.

### Perizinan dan Tata Niaga

Percepatan kepastian perizinan sumber daya alam melalui implementasi kebijakan satu peta (36,9%):	Perbaiki integrasi data ekspor impor pada komoditas pangan dan kesehatan (41,5%): Perbaiki	Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO) untuk penanganan perkara, perizinan, dan pengadaan barang/jasa (17,1%):
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piloting di 5 Provinsi (Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat dan Papua)</li> <li>• Penetapan Kawasan Hutan</li> <li>• Penetapan Peta Digital</li> <li>• Integrasi ILOK dan IUP</li> <li>• Penyelesaian P1TTI</li> <li>• Integrasi RZWP3K</li> </ul>	<p>Perbaiki tata kelola impor dan ekspor melalui sistem data simpul yang akurat dan mutakhir serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan strategis dan kesehatan melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK). Aksi ini difokuskan pada komoditi pangan seperti bawang putih, gula, jagung, beras, daging, dan garam, serta komoditas kesehatan seperti alat kesehatan dan vaksin.</p>	<p>Pemanfaatan data BO diharapkan dapat menghilangkan penyimpangan korupsi untuk Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).</p>



### Keuangan Negara

Percepatan integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik (42,7%)

- Integrasi sistem perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat
- Untuk tingkat daerah (SKD) sedang diselesaikan untuk menjadi aplikasi umum perencanaan-penganggaran yang akan digunakan Pemda

Penguatan implementasi pengadaan barang/jasa dan pembayaran berbasis elektronik (12,2%)

- Tersedianya sistem pembayaran elektronik (e-payment) dalam Pengadaan Barang/Jasa K/L/D
- Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi
- Tersedia dan bermanfaatkannya sistem informasi pengadaan barang/jasa konstruksi
- Tersedia dan bermanfaatkannya sistem informasi pengadaan alat kesehatan
- Termanfaatkannya e-katalog lokal dan sektoral

Pembenahan tata kelola penerimaan negara pada Penerimaan Negara Pajak (PNBP) dan Cukai (24,5%).

Pembenahan tata kelola PNBP dilakukan mulai dari regulasi, metode perhitungan (struktur tarif) dan pemungutan, sampai ke pelaporan dan pengawasan

Pemanfaatan Data NIK yang terintegrasi untuk efektivitas dan efisiensi kebijakan sektoral (38,6%):

- Sasaran awal es untuk pendataan dan penyaluran program penanganan covid-19 dan Pemepatan Pemulihan Ekonomi Nasional
- Tingkat tingkat kopadanan DTKS dengan NIK sudah mencapai 98,8%
- Ketepatan penerima BPUM dan total target 12,5 juta penerima BPUM, sebanyak 12,7 juta (98,2%)
- Ketepatan jumlah PBI JKN, telah dilakukan sinkronisasi DTKS dengan data PBI JKN dengan hasil sejumlah 64.083.805 jiwa (100%) penerima PBI JKN telah padan dengan DTKS.

## Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi

Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan (46,2%)	Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah /APIP (22,5%)	Percepatan pembangunan sistem pemerintah berbasis elektronik - SPBE (34,3%)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dibetulkannya regulasi tentang layanan jasa kepelabuhanan yang selaras antara kewenangan pusat dan daerah</li> <li>• Penataan TKDM</li> <li>• Implementasi NIF</li> <li>• Penerapan pelayanan kepelabuhanan berbasis sistem teknologi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terpenuhinya kebutuhan APIP secara proporsional di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah</li> <li>• Meningkatnya Independensi APIP melalui evaluasi jabatan untuk penempatan kelas jabatan fungsional APIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya Arsitektur SPBE di K/L/D yang mangacu pada Arsitektur SPBE Nasional</li> <li>• Tersedianya Peta Rencana SPBE di K/L/D/Pemda yang mematu pada Peta Rencana SPBE Nasional</li> <li>• Tersedia layanan pengaduan pelayanan publik yang berkualitas dan terpadu melalui SP4N LAPORI</li> </ul>

Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi (SPPT-TI) (27,8%)	Penguatan integritas Aparat Penegak Hukum 38,5%
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kualitas pertukaran data penanganan perkara yang dipertukarkan melalui SPPT-TI</li> <li>• Meningkatnya pemanfaatan data penanganan perkara yang dipertukarkan lewat SPPT-TI</li> <li>• Menguatnya proses bisnis dan infrastruktur teknologi terkait SPPT-TI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penegulan kode etik di Lembaga Penegakan Hukum (LPH)</li> <li>• Peningkatan kesejahteraan Aparat Penegak Hukum (APH)</li> <li>• Penguatan akuntabilitas penanganan perkara</li> </ul>



# PENIN DAKAN

Mengupayakan pengembalian kerugian keuangan negara akibat kasus korupsi semakin optimal, kami terus melakukan penanganan perkara secara profesional. Partisipasi

masyarakat dalam pengaduan pun menjadi salah satu kunci suksesnya penanganan kasus korupsi.



# Data Penanganan Perkara

	2020	2021
Penyelidikan	114	128
Penyidikan	91	107
Penuntutan	81	122
Inkracht	109	95
Eksekusi	111	95

## Berdasarkan Jenis Perkara



**127 Orang**

Tersangka selama 2021

<b>30</b> Orang Anggota DPR & DPRD	<b>1</b> Orang Gubernur	<b>19</b> Orang Walikota, Bupati & Wakil	<b>16</b> Orang Eselon I,II,III,IV	<b>1</b> Orang Polisi	<b>30</b> Orang Pengacara	<b>28</b> Orang Swasta	<b>1</b> Lain-lain Korporasi
--	-------------------------------	--	--	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------	------------------------------------

## Berdasarkan Profesi

**Total Perkara Case Building :**  
**Total Perkara TPPU :**

**49 Kasus**  
**7 Kasus**

## 6 Kegiatan Tangkap Tangan :

1. Proyek Infrastruktur di Sulawesi Selatan
2. Pengisian Jabatan di Pemerintah Kabupaten Probolinggo
3. PBJ di Kab. Hulu Sungai Utara
4. PBJ di Kabupaten Kolaka Timur
5. Proyek-Proyek di Lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin
6. Perpanjangan Hak Guna Usaha Perkebunan PT Adimulia Agrolestari

## Sederet Tokoh Terjerat :

**JULIARI P. BATUBARA**  
(Menteri Sosial)

**Rp32,2 Miliar**

Perkara Suap Terkait Bantuan Sosial Penanganan Covid-19

- Pidana Penjara 12 Tahun
- Denda Rp500 Juta subsider 6 bulan kurungan
- Uang Pengganti Rp14,5 Miliar

**IMAM NAHRAWI**  
(Menteri Pemuda dan Olahraga)

**Rp8,3 Miliar**

Perkara Gratifikasi terkait Penyaluran Pembayaan dengan Skema Bantuan Pemerintah Melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia

- Pidana Penjara 7 Tahun
- Denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan
- Uang Pengganti Rp19 Miliar

**M NURDIN ABDULLAH**  
(Gubernur Sulawesi Selatan)

**Rp13 Miliar**

Perkara Suap terkait proyek infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan

- Pidana Penjara 5 Tahun
- Denda Rp500 Juta subsider 4 bulan penjara
- Uang pengganti Rp2,18 Miliar dan Sin\$350 Ribu

**WAHYU SETIAWAN**  
(Anggota Komisi Pemilihan Umum)

**Rp600 Juta**

Perkara Suap penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024

- Pidana Penjara 7 Tahun
- Rp200 Juta subsider 6 bulan kurungan

## Daftar Pencarian Orang :

**Harun Masiku**



**Kirana Kotama**



**Izil Azhar**



**Surya Darmadi**





# Bermodalkan Tangkap Tangan

Kira-kira sekitar pukul 04.00 pagi di tanggal 30 Agustus 2021, belum juga sebagian besar orang terbangun untuk berjibaku dengan sibuknya Senin, namun Tim Komisi Pemberantasan Korupsi telah meriuhkan subuh di beberapa titik Probolinggo, Jawa Timur, dengan mengamankan 22 orang tersangka.

Sejumlah dokumen termasuk dokumen berparaf pada Nota Dinas Pengusulan Nama Penjabat Kepala Desa, serta uang sejumlah Rp362.500.000 jadi saksi senyap dalam kegiatan tangkap tangan tersebut. Jumlah uang serta dokumen ini menjadi 'babat alas' terungkapnya modus tindak pidana korupsi dengan nilai yang lebih besar.

Bermula dari laporan masyarakat, KPK mengendus bahwa akan terjadi transaksi yang dilakukan oleh sejumlah ASN Calon Penjabat Kepala Desa yang diserahkan melalui Camat kepada Bupati Probolinggo PTS.

Rupanya PTS tidak sendiri, selain bersama perangkat desa dan Camat, kasus ini ikut menyeret HA suami dari PTS. HA sendiri bukan sekadar suami saja, namun rupanya anggota dewan aktif. Setelah ditelusuri lebih jauh, HA juga dulunya adalah mantan Bupati Probolinggo yang pernah menjabat selama dua periode

Kosongnya jabatan Kepala Desa menjadi awal mula perkara. Mundurnya jadwal pemilihan Kepala Desa serentak Tahap II di Kabupaten Probolinggo, serta 252 Kepala Desa yang selesai menjabat pada waktu itu, membuat lowong kursi-kursi jabatan. Demi mengisi kekosongan dalam rentang waktu tertentu, maka akan dipilihlah Penjabat Kepala Desa yang berasal dari ASN di Pemkab Probolinggo, yang diusulkan Camat.

Nama-nama para Calon Penjabat Kepala Desa ini kemudian diusulkan dengan terlebih dahulu disetujui oleh HA, yang dalam hasil penyelidikan menjadi representasi dari PTS, dengan memberikan paraf pada Nota Dinas Pengusulan Nama.

Dari hasil pengusulan nama ini, para ASN yang diusulkan wajib menyetorkan uang sejumlah Rp20 juta. Ada juga upeti senilai Rp5 juta yang perlu dibayar untuk penyewaan tanah khas desa. Bagi para pejabat, jumlah uang ini akan sebanding dengan manfaat yang mereka dapat ketika menjabat. Selain honor, Penjabat Kepala Desa dapat memanfaatkan hasil dari pengelolaan tanah bengkok, serta pengelolaan dana desa di bawah kuasanya.

27 September 2021 menjadi titik balik bagi KPK dengan melakukan serangkaian penggeledahan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Probolinggo, serta 2 rumah kediaman tersangka. KPK mengamankan sejumlah bukti yang terkait dengan perkara serta saksi yang ikut diperiksa, mulai dari perangkat desa, pensiunan, PNS, sampai dengan wiraswasta. Modus korupsi yang bermula dari tingkat desa ini menjadi cerlang dalam membongkar perkara korupsi yang lebih besar.

Dengan modal awal tangkap tangan, selanjutnya KPK menetapkan PTS dan HA dengan dugaan tindak pidana gratifikasi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). KPK pun terus menelusuri dugaan penerimaan sejumlah uang serta melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset atas nama tersangka dengan nilai aset yang mencapai Rp50 miliar.

Pelacakan aset-aset yang berhubungan dengan kasus PTS ini terus dilakukan KPK, semata-mata agar pengembalian keuangan negara kian maksimal.

# Supervisi Perkara



## Supervisi Penanganan Perkara Selama Tahun 2021



## Pencarian DPO Perkara APH Lain :



### Khoironi F Cadda

Perkara Korupsi APBD  
Morowali Tahun 2007  
- Kejati Sulawesi Tengah



### Cristian Andi Pelang

Perkara Korupsi Pekerjaan  
Penggantian Jembatan  
Torate CS Donggala  
- Kejati Sulawesi Tengah



### Hasan

Perkara Korupsi Penyaluran  
Kredit Usaha Rakyat  
- Kejati DKI



### Deni Gumelar

Perkara Korupsi dalam Proyek  
Pembangunan Pabrik Bentonite  
Jabar-Kejati Jabar

## Perkuat Kapabilitas APH dan APIP



**Total Peserta: 310 Orang**



# Berawal Dari Pengaduan

Peran masyarakat begitu penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Tanpa bantuan masyarakat, rasanya mustahil KPK bisa memberantas korupsi hingga ke penjuru negeri. Terlebih dengan posisi KPK yang hanya berkedudukan di ibukota negara dan jumlah pegawai yang terbatas.

Tahun ini, hampir seluruh informasi yang berasal dari pengaduan masyarakat telah melalui proses verifikasi. Informasi yang valid dan di dukung dengan bukti-bukti yang kuat menjadi pondasi awal bagi KPK untuk menyelidiki kasus-kasus korupsi. Kami menghargai setiap kontribusi masyarakat yang telah membantu KPK dalam melaksanakan tugas demi mewujudkan cita-cita Indonesia bebas dari korupsi.



4.040

Pengaduan Masyarakat



4.030

Pengaduan telah di verifikasi



10

Masih dalam proses verifikasi

2.484

Laporan pengaduan diarsipkan

1.531

Laporan pengaduan diteruskan ke penelaah

15

Laporan pengaduan diteruskan ke internal sebagai informasi ke direktorat lain

## Perbandingan dengan tahun sebelumnya

### Tahun 2020



4.151

Pengaduan masyarakat



1.429

Laporan terkait TPK diteruskan ke penelaah

### Tahun 2021



4.040

Pengaduan masyarakat



1.531

Laporan terkait TPK diteruskan ke penelaah

# Serius Merawat Barang Bukti

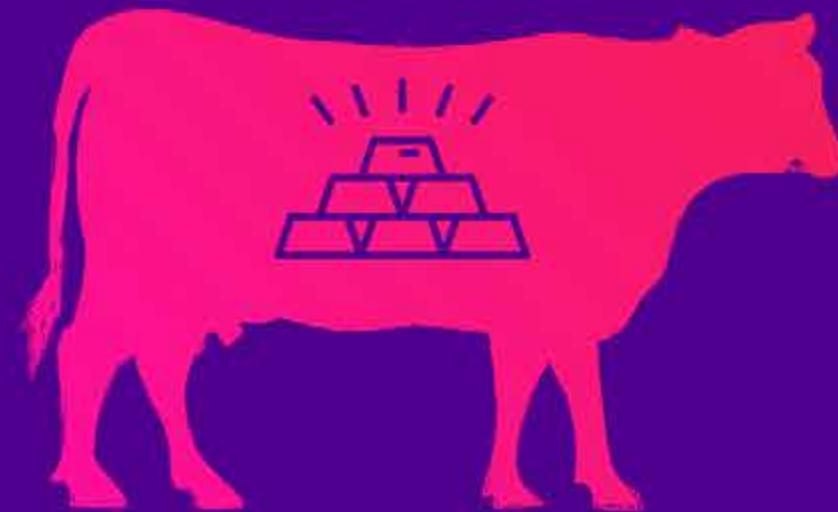


Mulai 12 Oktober 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki dasar hukum baru soal pengelolaan barang bukti seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2021 tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sebelum adanya PP 105/2021, konsekuensi dari penyitaan semua barang bukti harus menunggu proses penyidikan hingga eksekusi selesai. Sehingga proses perawatan barang bukti membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Belum lagi, nilai aset yang mengalami penyusutan karena lamanya proses tersebut. KPK sendiri melakukan perawatan, pemeliharaan dan penyimpanan benda-benda sitaan dengan serius dan hati-hati meski banyak kendala dan tantangan yang dihadapi.

Tak sedikit benda sitaan yang perlu perhatian ekstra, apalagi kalau bendanya sangat unik dan bernilai fantastis. Seperti contohnya sapi jenis Limousin dan Simental. Pemeliharaan sapi Limousin dan Simental tentu berbeda dengan sapi biasa. Saat itu, KPK perlu mengeluarkan biaya sekitar Rp14 juta/10 hari untuk menanggung makan 30 ekor sapi yang disita.

Tim Pengelolaan barang bukti KPK bahkan sampai mengejar-ngejar penyidik agar dapat melakukan lelang di awal mengingat biaya perawatannya yang sangat mahal. Belum lagi, tak ada yang bisa menjamin kalau sapi tersebut mati karena menunggu sidang inkrah. Kecemasan lainnya ialah sapi jenis Limousin dan Simental memiliki batas usia tertentu agar dagingnya tidak menjadi alot ketika dikonsumsi.



Dan bobot sapi juga menjadi perkiraan penyusutan nilai aset. Sapi yang terlalu gemuk, kakinya bisa patah karena tak kuat menopang bobot badannya. Di antara tiga puluh sapi yang disita memang ada yang beratnya lebih dari satu ton. Sedangkan yang lain berkisar 400-800 kilogram. Beruntung, semua sapi masih dalam keadaan sehat hingga proses lelang berlangsung. Tiga puluh sapi terjual dengan harga Rp926 juta. Harga yang cukup memuaskan bagi KPK karena sapi dilelang bertepatan dengan peringatan Idul Adha.

Pengelola barang bukti memang membutuhkan keahlian khusus karena beragamnya benda-benda yang disita. Kompetensi pegawai dalam kekhususan inilah yang menjadi tantangan. Dengan karakteristik benda sitaan yang berbeda-beda, pegawai KPK harus punya kemampuan untuk memperlakukan benda sitaan. Misalnya saja logam mulia, tak semua orang mengetahui bagaimana prosedur yang baik dan benar untuk menyimpan logam mulia, apakah cukup disimpan di brankas atau perlu penyimpanan khusus.

Kendala dan tantangan selalu ada tapi KPK terus berupaya mengelola barang sitaan dan rampasan dengan sebaik-baiknya. Kini KPK dapat melakukan lelang di tahap penyidikan dengan Peraturan Pemerintah yang baru. Harapannya satu, upaya pemulihan kerugian keuangan negara dapat dilakukan dengan lebih optimal.

# Corruption Perception Index



Pandemi dan krisis multidimensi yang masih dihadapi negara di seluruh dunia sepanjang 2021 tidak memberi banyak perubahan pada tingkat korupsi di dunia. Transparency International merilis Corruption Perception Index (CPI) yang menunjukkan tingkat korupsi di seluruh dunia masih mengalami stagnansi. Indonesia sendiri berhasil naik 1 poin menjadi 38 setelah pada 2020 turun dengan memperoleh 37 poin. Angka tersebut membuat Indonesia bergeser 5 peringkat menjadi 97 dari 180 negara pada 2021.

CPI yang diperoleh Indonesia pada 2021 mendorong para pemangku kepentingan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu Presiden dan segenap jajaran pemerintah, Lembaga Penegak Hukum (Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI dan KPK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Partai Politik serta pihak swasta dan para pelaku usaha untuk terus membuat kemajuan nyata dalam melawan korupsi, menciptakan iklim demokrasi yang berkualitas dan menjunjung hak asasi manusia.

## 3 indikator penyusunan CPI yang mengalami kenaikan:



## 3 indikator mengalami stagnansi:



## 3 indikator yang mengalami penurunan:



### PRS International Country Risk Guide (ICRG):

Penilaian PRS International Country Risk Guide terkait dengan korupsi dalam sistem politik, pembayaran khusus dan suap ekspor-impor, serta adanya hubungan mencurigakan antara politisi dan pebisnis

### Bertelsmann Transformation Index (BTI):

Index yang menunjukkan bagaimana pemberian hukuman pada pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangan atau pemerintah dalam mengendalikan korupsi

### Varieties of Democracy project:

Menilai soal kedalaman korupsi politik di eksekutif, legislatif dan yudikatif, menilai korupsi di birokrasi terutama pada eselon tertinggi atau kabinet, serta korupsi besar dan kecil yang memengaruhi kebijakan publik



# Bersiap Pimpin Kerja Sama Internasional Antikorupsi G20

---

Pada G20 Rome Summit yang diselenggarakan di Roma, Italia pada 30-31 Oktober 2021, Indonesia telah resmi memegang Presidensi G20. KPK sebagai lembaga antikorupsi di Indonesia juga akan berkesempatan menjadi Ketua dalam pertemuan *Anti-Corruption Working Group (ACWG)* G20 di tahun 2022.

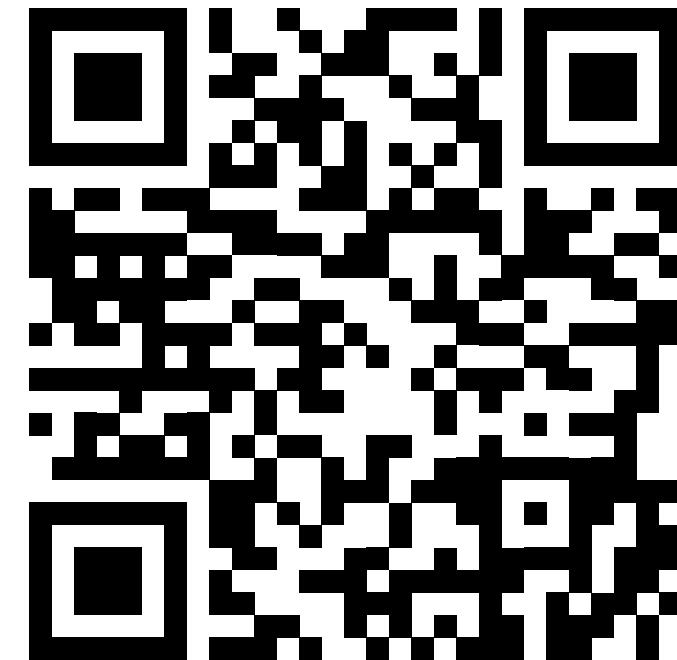
KPK selaku focal point Indonesia untuk G20 ACWG telah mengikuti forum ACWG mulai pada pertemuan pertama tahun 2011. Indonesia bahkan menjadi *co-chair* dengan Perancis selaku *Chair* G20 di tahun 2011. Sejak saat itu, KPK aktif memberi masukan Indonesia terhadap proses negosiasi berbagai dokumen kesepakatan yang dihasilkan pada G20 ACWG. KPK juga mendorong standar dan kesepakatan G20 untuk diimplementasikan di domestik, dengan tujuan mengefektifkan kerja pemberantasan korupsi.

G20 ACWG berperan penting dalam merumuskan rekomendasi yang komprehensif guna mendorong upaya negara anggota G20 berkontribusi nyata terhadap pemberantasan korupsi. Melalui *G20 High Level Principles (HLPs)*, forum G20 menyepakati prinsip-prinsip antikorupsi pada isu spesifik tertentu seperti konflik kepentingan, transparansi *beneficial ownership*, manajemen BUMN, integritas sektor swasta, dll. Dalam implementasinya, G20 HLPs dapat digunakan sebagai standar internasional dalam upaya pencegahan maupun pemberantasan korupsi bagi negara anggota G20 maupun negara lainnya. Kesepakatan G20 ACWG akan disahkan oleh kepala negara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang diadakan setiap tahunnya.

Berbagai persiapan telah dilakukan oleh KPK termasuk memilih dan menyusun isu-isu prioritas yang akan dibawa oleh KPK ke dalam pertemuan. KPK juga telah melakukan serangkaian diskusi untuk menjangkau masukan terhadap isu-isu prioritas yang akan didorong Indonesia pada G20 ACWG tahun 2022 yang antara lain melibatkan K/L yang relevan, Apgakum, perwakilan masyarakat sipil, akademisi dan organisasi internasional.

Pada tahun 2022, KPK akan mendorong 4 isu prioritas yakni: Peningkatan Peran Audit dalam Pemberantasan Korupsi; Partisipasi Publik dan Pendidikan Antikorupsi; Pengawasan *Professional Enablers* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Korupsi di Sektor *Renewable Energy*. Indonesia juga telah menggandeng Australia untuk memegang keketuaan bersama G20 ACWG tahun 2022.

# **Ayo! Selamatkan Negeri dari Korupsi**



Akses di laman berikut

<http://bit.ly/lampiranKPK2021>

**KPK**

**Komisi Pemberantasan Korupsi**